

MENGAPA PERLU BERHATI-HATI PADA BITCOIN



MARET 2018

EDUKASI KONSUMEN

SIKAPIUANGMU.OJK.GO.ID



Satu layanan untuk Indonesia maju

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR INDUSTRI PEMBIAYAAN HARUS IKUT BERPERAN



Jadilah Perempuan Masa Kini yang Cerdas Finansial



INDUSTRI PEMBIAYAAN TAK LAGI KONVENSIONAL

Gencarnya pemerintah membangun infrastruktur dalam beberapa tahun belakangan ini bukanlah tanpa sebab. Bagi pemerintah, pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan mendesak, mengingat Indonesia negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia.

Apalagi, salah satu indikator negara berkembang dilihat dari pembangunan infrastruktur yang memadai. Pembangunan infrastruktur merupakan investasi jangka panjang, di mana manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam beberapa tahun ke depan. Minimal 5 tahun, bahkan rata-rata 10 tahun hingga 30 tahun.

Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mampu menghidupkan kawasan terbelakang menjadi lebih maju dan berkembang menjadi harapan pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan biaya yang tentu tidak sedikit dalam rangka merealisasikan pembangunan infrastruktur.

Saat ini, industri pembiayaan yang tidak terbantahkan lagi menjadi salah satu sektor jasa keuangan yang mampu menopang pertumbuhan

ekonomi nasional memiliki peluang besar bagi pendanaan sektor infrastruktur.

Bahkan pemerintah menegaskan bahwa sumber pembiayaan infrastruktur nasional tidak bergantung pada APBN semata, melainkan juga dari BUMN dan swasta. Untuk itu pemerintah membuat inovasi pembiayaan agar publik dapat menikmati pembangunan infrastruktur.

Mengenai pembiayaan infrastruktur melalui industri pembiayaan ini sangat dimungkinkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun menerbitkan peraturan tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan.

Otoritas berharap semakin banyak industri pembiayaan yang terlibat aktif dalam pembiayaan infrastruktur. Memang tidak harus dalam proyek besar, dukungan tersebut dinilai perlu direalisasikan, bahkan mulai dari pembiayaan berskala kecil.

Peran serta industri pembiayaan dalam proses pembangunan infrastruktur di negeri tercinta Indonesia ini sangat diharapkan, apalagi OJK sudah memberi celah bagi industri pembiayaan agar tidak terpaksa pada pembiayaan konvensional semata. ●



Dewan Pelindung: Wimboh Santoso (Ketua Dewan Komisiner OJK)

Dewan Penasehat: Tirta Segara (Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen),

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Sarjito (Deputi Komisiner Edukasi dan Perlindungan Konsumen)

Redaktur Ahli: Sondang Martha Samosir (Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan), Rudi Saleh (Kepala Departemen Perlindungan Konsumen), Horas V.M. Tarihoran (Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan), Eko Ariantoro (Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan), Relu Ginting (Plt. Direktur Penelitian Kebijakan dan Pengaturan EPK), Tri Herdianto (Plt. Direktur Pembelaan Hukum Konsumen), Agus Fajri Zam (Direktur Pelayanan Konsumen), Bernard Widjaja (Direktur Market Conduct)

Redaktur: Greta Joice Siahaan (Deputi Direktur Literasi dan Informasi)

Redaksi: Anggota Tim Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan

Alamat Redaksi: Bidang Edukasi & Perlindungan Konsumen OJK Menara Radius Prawiro Lantai 2, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta Pusat 10350

Telepon: (021) 29600000 Faksimili: (021) 3866032 Website: www.ojk.go.id.

Majalah Edukasi Konsumen dapat diunduh pada minisite OJK: sikapiuangmu.ojk.go.id

Redaksi menerima kiriman naskah dan berhak mengedit naskah tanpa menghilangkan intisari dari artikel sebelum dipublikasikan

Daftar Isi

■ Edisi Maret 2018



SOROTAN UTAMA

Pembangunan Infrastruktur Industri Pembiayaan Harus Ikut Berperan

Industri pembiayaan tidak terbantahkan lagi menjadi salah satu sektor jasa keuangan yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Kapasitasnya yang terus bertumbuh setiap tahun pun niscaya menjadi potensi bagi pendanaan infrastruktur.

5

3 **SALAM REDAKSI**
Industri Pembiayaan Tak Lagi Konvensional

9 **INSPIRASI**
Menemukan *Passion* di Industri Asuransi

11 **FOKUS PASAR MODAL**
Mendorong Pasar Modal Sebagai Sumber Pembiayaan Jangka Panjang

13 **FOKUS PERBANKAN**
Bankir dan Regulator Lebih Optimistis

15 **INFO PERBANKAN**
Bank Run dan Kondisi Likuiditas Perbankan

16 **TINJAUAN REGULASI**
Memandu Kehati-Hatian Bank Lewat BMPK

18 **BISNIS PEMULA**
Mempermudah Akses Permodalan UKM & *Start Up*

22 **WASPADA INVESTASI**
Mengapa Perlu Hati-Hati Pada Bitcoin?

25 **TELAAH PRODUK**
Menakar Prospek Investasi Saham 2018

27 **INFO PASAR MODAL**
Apa Itu Komodo Bond?

28 **FOKUS GLOBAL**
Buka Peluang Investasi Industri Keuangan

30 **ANGKA BICARA**
Valuasi IHSG Tinggi

31 **INFO PEMBIAYAAN**
NPF Industri Multifinance Diyakini Terus Membaik

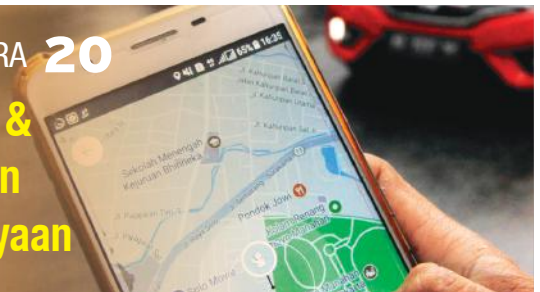
32 **MILESTONE**
OJK dari Masa ke Masa (EPK OJK Sepanjang 2017)

37 **TOKOH**
Membuka Akses Keuangan kepada Nelayan Kecil

39 **INFO IKNB**
Aturan Detil tentang Asuransi Barang Milik Negara Disiapkan

KONSUMEN BICARA 20

Lebih Mudah & Murah dengan Jasa Pembiayaan



34 PERSPEKTIF

Wimboh Santoso
Ketua Dewan Komisiner OJK

Perbankan Siap Berlari Kencang



42 SERI PENGETAHUAN UMUM

- Pengelolaan Dana Jaminan Sosial Atasi Defisit, Bauran Strategi Disiapkan
- Utak Atik Investasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan
- Asa Berkembang di Industri Pergadaian

45 ARTIKEL

- Pentingnya Menjaga Riwayat Kredit

46 KABAR OTORITAS

- Edukasi Keuangan dari OJK untuk Masyarakat Perbatasan
- OJK Gandeng Ikadin Sosialisasi Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan & Fidusia
- Polres Situbondo & OJK Jember gelar Sosialisasi Waspadia Investasi & Perjanjian Fidusia
- OJK NTB Edukasi Siswa Difabel Tunanetra
- Edukasi Keuangan bagi Komunitas Nelayan
- OJK Beri Edukasi Waspadia Investasi untuk Tim Penggerak PKK & UMKM Jambi

51 INSIGHT

Membangun Kesadaran Berinvestasi





Pembangunan Infrastruktur

INDUSTRI PEMBIAYAAN HARUS IKUT BERPERAN

Industri pembiayaan tidak terbantahkan lagi menjadi salah satu sektor jasa keuangan yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Kapasitasnya yang terus bertumbuh setiap tahun pun niscaya menjadi potensi bagi pendanaan infrastruktur.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan belanja infrastruktur sebesar Rp387,3 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Angka tersebut naik signifikan Rp70,2 triliun dari realisasi APBN-Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp 317,1 triliun.

Alokasi anggaran infrastruktur ini disalurkan melalui belanja Kementerian/Lembaga (K/L), non K/L, transfer ke daerah dan dana desa, serta pembiayaan ke Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN). Terbaru, pemerintah menyuntikkan modal ke BLU LMAN sebesar Rp20 triliun di tahun 2018 atau naik Rp4 triliun dari sebelumnya Rp16 triliun di APBN-P 2016.

Tujuan dari upaya pemerintah itu untuk pembelian tanah dalam rangka membangun infrastruktur. Jadi anggaran infrastruktur Rp387,3 triliun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, menahan ekonomi Indonesia dari gejolak ekonomi global, dan memproteksi kelompok miskin.

Bahkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan sumber pembiayaan infrastruktur nasional tidak bergantung APBN saja, melainkan juga dari BUMN dan swasta. Untuk itu pemerintah membuat inovasi pembiayaan agar publik dapat menikmati pembangunan infrastruktur.

Mengenai pembiayaan infrastruktur melalui *multifinance*, sangat dimungkinkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Regulasi itu menyebutkan bahwa kegiatan usaha *multifinance* meliputi pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna dan kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

Pembiayaan investasi itu, seperti dijelaskan pada Pasal 2 POJK No. 29/2014, dapat dilaksanakan dengan sejumlah cara. Salah satunya dengan pembiayaan infrastruktur, yakni dalam

SOROTAN UTAMA

bentuk pengadaan barang dan/atau jasa untuk pembangunan infrastruktur.

Kendati demikian, realisasi pembiayaan infrastruktur oleh *multifinance* masih terbilang minim. Berkaca pada data OJK tentang statistik pembiayaan, total aset industri *multifinance* pada akhir 2017 mencapai Rp477,16 triliun atau bertumbuh 7,77% dibandingkan tahun sebelumnya. Total piutang pembiayaan industri mencapai Rp414,84 triliun, yang terdiri dari Rp386,08 triliun untuk pembiayaan konvensional dan Rp28,76 triliun untuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Pada periode tersebut, total pembiayaan investasi pada segmen konvensional tercatat sebesar Rp119,04 triliun atau bertumbuh 13,39% dibandingkan tahun sebelumnya atau lebih tinggi dari pertumbuhan total piutang pembiayaan.

Meskipun demikian, kontribusi pembiayaan infrastruktur pada lini pembiayaan investasi itu diyakini masih sangat minim. "Pembiayaan infrastruktur agak kurang," kata Suwandi Wiratno, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) baru-baru ini.

Faktor pertama yang melatarbelakangi kondisi tersebut adalah syarat ekuitas minimum bagi *multifinance* untuk menjalankan lini bisnis tersebut.

Pasal 13 POJK No.29/POJK.05/2014 menyebutkan sejumlah syarat pembiayaan infrastruktur, termasuk ekuitas mesti lebih besar dari Rp1 triliun.

Padahal, sejauh ini tidak begitu banyak *multifinance* yang memenuhi kualifikasi tersebut. Tantangan berikutnya, kata Suwandi, adalah tenor pembiayaan infrastruktur itu berjangka panjang.

Kondisi itu menyebabkan *multifinance* sulit menyalurkan pembiayaan sebab tidak memiliki sumber pendanaan jangka panjang. Sulitnya sumber pendanaan dengan tenor panjang ini juga sama seperti yang terjadi untuk opsi pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) oleh

Pulau Sumatera

- **Aceh**
 - Pembangunan FO Sp. Surabaya, Banda Aceh
- **Sumatera Utara**
 - Pelebaran jalan Pangururan-Ambarita-Tomok-Onan Runggu - (KSPN Danau Toba)
 - Pelebaran jalan Tele-Pangururan-Nainggolon-Onan Runggu (KSPN Danau Toba)
 - Pembangunan jalan bebas hambatan Medan-Kualanamu
 - JBH Medan-Binjai
 - JBH Pekanbaru-Kandis-Dumai
- **Sumatera Barat**
 - Pembangunan jalan Padang Bypass
 - Pelebaran jalan Bts. Kota Painan-Kambang-Inderapura-Tapan (WINRIP)
- **Bengkulu**
 - Pelebaran jalan Mukomuko-Bantal (WINRIP)
 - Pelebaran jalan Ipuh-Seblat (WINRIP)
 - Pelebaran jalan SP. Tiga Kayu Kunyit (Manna)-Tanjung Kemuning (WINRIP)
- **Sumatera Selatan**
 - Pembangunan FO Sp. Bandara-Tanjung Api-api (KEK Tanjung Api-api)
 - Pembangunan jembatan Musi IV
- **Lampung**
 - Pembangunan jalan dan jembatan Lingkar Bandar Jaya (Renstra)

Proyek Strategis yang Akan Dibangun Pemerintah Tahun 2017

Pulau Jawa dan Bali

- **Banten**
 - Pembebasan lahan untuk pelebaran jalan Citeureup-Tanjung Lesung (KEK Tanjung Lesung)
 - Rekonstruksi jalan Citeureup-Tanjung Lesung (KEK Tanjung Lesung)
- **Jawa Barat**
 - Pembangunan jalan bebas hambatan Cisumdawu fase I dan II
- **Jawa Tengah**
 - Pembangunan 4 flyover di Brebes Dermoleng, Klonengan, Kretek, Kesambi, Perlintasan Tak Sebidang Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal
 - Pelebaran jalan Duwet-Giri Woyo; Tambakmulyo-Wawar (RRDP)
 - Pembangunan jalan Bts. Jabar-Patimuan-Tambakreja-Bantarsari; Tambakmulyo-Jladri-Karangbolong (Pansela Jawa/IDB)
 - Pembangunan jalan tol Solo-Kertosono
- **D.I. Yogyakarta**
 - Pembangunan jalan Jerukwudel-Baran-Duwet (Pansela Jawa/IDB)
 - Pembangunan jalan Legundi-Planjan (Pansela Jawa/IDB)
 - Pembangunan jalan Bugel-Girijati (Pansela Jawa)
 - Pembangunan jalan Bugel-Galur-Poncosari (Pansela Jawa)
 - Pembangunan jembatan Kretek 2 (Pansela Jawa/IDB)
- **Jawa Timur**
 - Pembangunan jalan Munjungan-Prigi-Bts. Kabupaten Tulungagung/Blitar-Serang-Bts. Kabupaten Malang-Sp. Balekambang; Jarit-Puger-Sumberrejo (Pansela Jawa/IDB)
- **Bali**
 - Pelebaran jalan Denpasar-Tuban
 - Pelebaran jalan Gilimanuk-Cekik

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), diolah.

Pulau Kalimantan

- **Kalimantan Barat**
 - Pelebaran tambah lajur Bts. Serawak-Nanga Badau
 - Pembangunan jalan Temajuk-Aruk; Rasau-Sepulau-Bts. Kapuas Hulu/Sintang; Bts. Kecamatan Siding/Seluas-Bts. Kecamatan Sekayan/Entikong; Nanga Era-Bts. Kaltim (perbatasan Kalimantan)
 - Pembangunan jembatan Entikong Cs (perbatasan Kalimantan)
 - Pembangunan jembatan ruas Temajuk-Badau (perbatasan Kalimantan)
- **Kalimantan Tengah**
 - Pembangunan jembatan Tumbang Samba
- **Kalimantan Selatan**
 - Pelebaran jalan akses Pelabuhan Trisakti
 - Pelebaran jalan lingkaran dalam Batulicin II

- **Kalimantan Timur**
 - Pembangunan jalan Bts. Kalbar-Tiong Ohang; Long Pahangai-Long Boh; Tiong Ohang-Long Pahangai (paralel perbatasan Kalimantan)
 - Pembangunan jembatan paralel perbatasan
 - Pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda
 - Pembangunan jembatan S. Manggar
 - Pembangunan jembatan Pulau Balang
- **Kalimantan Utara**
 - Pembangunan jalan Long Nawang-Long Pujungan; Long Pujungan-Kemuat-Langap; Mensalong-Tau Lumbis (paralel perbatasan Kalimantan)
 - Penanganan jalan lingkaran Pulau Sebatik
 - Pembangunan jalan Long Bawang-Long Midang
 - Penanganan jembatan sepanjang paralel perbatasan

Pulau Nusa Tenggara

- **Nusa Tenggara Barat**
 - Rekonstruksi jalan Sengkol-Kuta (KSPN Mandalika)
 - Pembangunan Talabiu-Bts. Kota Bima (akses bandara)
- **Nusa Tenggara Timur**
 - Pembangunan jalan lintas utara Flores sebagai dukungan KSPN Labuan Bajo
 - Pembangunan jalan perbatasan NTT-RDTL (Sabuk Merah)

Pulau Maluku

- **Maluku**
 - Pembangunan dermaga TNI AL Tawiri
 - Pembangunan jalan lingkaran Pulau Marsela (Pulau Kecil Terluar)
 - Pembangunan jembatan Wae Arafura
- **Maluku Utara**
 - Pelebaran jalan Bere Bere-Sofi (KSPN Morotai)
 - Rekonstruksi Weda Sagae-Patani

Pulau Sulawesi

- **Sulawesi Selatan**
 - Pembangunan jalan dan jembatan Bypass Mamminasata
 - Pembangunan jalan dan jembatan Middle Ring Road
 - Pembangunan underpass Simpang Mandai
- **Sulawesi Barat**
 - Pembangunan jalan Mamuju Arterial Road
- **Sulawesi Tengah**
 - Rekonstruksi dan penanganan lereng Nupabomba-Kebon Kopi-Toboli (Bagian dari Palu-Parigi)
- **Sulawesi Tenggara**
 - Pembangunan jembatan Teluk Kendari
- **Sulawesi Utara**
 - Pembangunan jalan bebas hambatan Manado-Bitung
 - Pelebaran jalan tambah lajur Manado Bypass (Winangun-Maumbi)
- **Gorontalo**
 - Pembangunan jalan dan jembatan Gorontalo Outer Ring Road

Pulau Papua

- **Papua Barat**
 - Pembangunan jalan Mameh-Windesi III (Trans Papua)
 - Pembangunan jalan lingkaran Raja Ampat
 - Rekonstruksi jalan Aimas (KM 23)-Pelabuhan Arar (Sorong)
 - Pembangunan jalan Bofuer-Windesi
 - Pembangunan jalan Bofuer- Tiwara-Moyana-Wonama
- **Papua**
 - Pembangunan jalan Bts Provinsi Papua Barat-Kwatisore (Trans Papua)
 - Pembangunan jalan Enarotali-Sugapa-Beoga-Ilaga-Sinak-Mulia (Trans Papua)
 - Pembangunan jalan Kenyam-Dekai (Trans Papua)
 - Pembangunan jalan Habame-Kenyam (Trans Papua)
 - Pembangunan jalan Towe Hitam-Oksibil-Iwur-Warapko (paralel perbatasan)
 - Pembangunan jalan Dodalim-Peletom; Nakias-Kaliki (MIFEE)
 - Pembangunan jembatan Holtekamp
 - Pembangunan jalan Wagete-Timika
 - Pembangunan jalan Depapre-Bongkrang
 - Pembangunan jalan Membramo-Elelim

SOROTAN UTAMA

multifinance. “Untuk berpartisipasi juga cukup sulit, biasanya untuk infrastruktur butuh pinjaman 10 tahun. Itu tidak mungkin *multifinance* biyai,” jelasnya.

Managing Director PT Indosurya Inti Finance Mulyadi Tjung juga mengakui kendala tersebut. Menurutnya, sejauh ini sektor perbankan masih mendominasi pembiayaan infrastruktur sebab ukuran pendanaannya terbilang besar dan jangka panjang. Perbankan, jelasnya, juga dapat menawarkan bunga pinjaman yang lebih murah untuk pengembangan infrastruktur tersebut. “Pembiayaan infrastruktur belum menjadi segmen *multifinance*,” ungkapnya.

Apalagi, Mulyadi mengatakan, sejauh ini sebagian besar sumber pendanaan *multifinance* masih berasal dari sektor perbankan. Berdasarkan data OJK per 31 Desember 2017, sekitar 93,42%

pendanaan yang diterima berasal dari perbankan. Sebanyak Rp172,89 triliun (66,47%) dari bank dalam negeri dan Rp70,10 triliun (26,95%) dari bank luar negeri.

Oleh karena itu, Menurut Mulyadi, sejauh ini pihaknya belum menjajaki penyaluran pembiayaan ke lini tersebut, kendati hingga akhir 2017, 69% dari total pembiayaan Indosurya Finance disalurkan dalam bentuk pembiayaan investasi. “Jadi berat untuk masuk ke pembiayaan infrastruktur,” ujarnya.

Setali tiga uang, Direktur Utama PT Astra Credit Companies Jodjana Jody mengakui bahwa problem sumber pendanaan itu masih menjadi kendala kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang bertenor panjang. *Multifinance*, jelasnya, mampu membiayai dengan tenor maksimal 5 tahun.

Tenor itu pun dinilai hanya dapat diberikan oleh *multifinance* yang memperoleh dana dari penerbitan

surat utang. “Kalau pinjam dari bank dengan *fix interest*, itu *kan* menjadi mahal. Kalau mau membiayai proyek infrastruktur mana kuat,” ungkapnya.

Terus Didorong

Sementara itu, Bambang W. Budiawan, Kepala Departemen Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II B OJK berharap semakin banyak *multifinance* yang terlibat aktif dalam pembiayaan infrastruktur. Dia mengatakan, hal tersebut di tengah meningkatnya minat investor asing untuk masuk ke industri pembiayaan nasional. “Ini untuk mendukung ekonomi bangsa,” ungkapnya.

Tidak melulu dalam proyek besar, dukungan tersebut dinilai perlu direalisasikan, bahkan mulai dari pembiayaan berskala kecil. Bambang menyatakan, sejauh ini sudah ada *multifinance* yang fokus untuk membiayai *genset* di daerah guna meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah tersebut.

Dia pun mengapresiasi fokus pembiayaan *multifinance* yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pemodal asing tersebut. Pihaknya menginginkan, ke depan semakin banyak *multifinance* yang terlibat dalam sektor tersebut, ketimbang berebut ceruk pasar di sektor otomotif. “Ada yang sudah serius membiayai *powerplant* untuk membantu tujuan pemerintah meningkatkan elektrifikasi. Jangan hanya biyai mobil saja,” katanya.

Suwandi pun mengakui bahwa sudah sejak lama *multifinance* menyalurkan pembiayaan untuk fasilitas infrastruktur berskala kecil, seperti *genset*. Kendati begitu, dia mengakui bahwa penyalurannya mengalami penurunan lantaran sarana tersebut dinilai tidak efisien.

Multifinance pun kian berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan mesin tersebut. “Memang PLN merasakan bahwa sarana dengan berbasis minyak itu harganya terlalu mahal. Jadi, *multifinance* juga hati-hati.” ●

Indikator Piutang Pembiayaan Tahun 2016–2017 (Rp Miliar)

Indikator	2016	2017	Persentase
Piutang Pembiayaan	387.505	414.836	7,05%
a. Piutang Pembiayaan Konvensional – Neto	356.138	386.080	8,41%
i. Piutang Pembiayaan Investasi – Neto	104.986	119.041	13,39%
ii. Piutang Pembiayaan Modal Kerja – Neto	20.977	22.827	8,82%
iii. Piutang Pembiayaan Multiguna – Neto	230.154	244.084	6,05%
iv. Piutang Pembiayaan Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK – Neto	21	128	509,52%
b. Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah – Neto	31.367	28.757	-8,32%
i. Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah – Neto	29.742	25.339	-14,80%
ii. Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah – Neto	-	15	-

Sumber: OJK

Menemukan *Passion* di Industri Asuransi

Di industri asuransi, ungkapan jurusan kuliah yang jauh berbeda dengan karir kerja sudah menjadi hal umum. Kendati begitu, kondisi itu ternyata tidak menjadi penghalang bagi pegiat asuransi untuk mencintai dan mengembangkan karir pribadi serta mengangkat kualitas industri secara umum.

Hal yang sama juga dilalui oleh Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe, yang kini menjabat Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.

Pria kelahiran Probolinggo, Jawa Timur, ini sebenarnya menamatkan pendidikan tinggi dengan gelar Sarjana Perikanan dari Universitas Brawijaya pada 1997. Sempat

bekerja sebagai marketing di Bank Halim Indonesia selama 1,5 tahun, dia akhirnya bergabung dengan PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Bumida) pada 1999.

Di situlah ia mengawali karirnya di industri asuransi, kendati kala itu mesti melepaskan peluang untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana di salah satu perguruan tinggi di Jawa Barat.

“Memang kalau ditanya kepada orang yang bekerja di asuransi, rata-rata bukan pilihan yang sudah dipilih sejak awal,” ungkapnya disertai tawa.

Dia mengisahkan pada awalnya ia masuk ke divisi pemasaran, bidang yang sama ketika ia bekerja di sektor perbankan.

Kendati begitu, Dody mengatakan dirinya ternyata diminta menjadi pengajar para agen.

Dody direkrut langsung oleh Julian Noor yang kala itu menjabat sebagai Kepala Divisi Teknik Bumida—Dody akhirnya menjadi suksesor dari Julian Noor sebagai Direktur Eksekutif AAUI pada 2017 lalu—.

“Sejak awal saya bilang tidak mau menjadi marketing, di bank pun saya tidak cocok sebagai marketing.”

Menjadi pengajar ternyata bukan sesuatu yang baru bagi

Dody. Ayahnya merupakan pensiunan dosen di Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya, yang juga menjadi tempat Dody meraih gelar sarjana. Ibunya pun adalah pensiunan guru di sekolah dasar di Malang, Jawa Timur.

Apalagi, dia mengatakan Bumida memiliki budaya perusahaan yang memberikan kesempatan meningkatkan kemampuan melalui pelatihan dan pendidikan kepada setiap pekerjanya. Pengetahuan baru itu pun dibagikan kembali kepada para pekerja lain di internal Bumida.

Dody pun merajut karir di Bumida hingga 2012. Selain menjabat sebagai kepala cabang selama 3 tahun, mayoritas periode karirnya di Bumida dijalani di bidang teknik asuransi.

“Hampir seluruh gelar asuransi saya dapatkan ketika bekerja di Bumida, baik yang tingkat lokal hingga internasional. Itu lah kenapa saya sangat tertarik untuk mengembangkan ilmu asuransi dan saya memang senang mengajar,” jelasnya.

Dody kemudian bergabung dengan PT Asuransi Jasa Tania Tbk. dan terlibat dalam upaya pengembangan produk ritel. Dia ditugaskan untuk membuat produk asuransi agrikultur.

Pada 2015, ia kemudian melanjutkan karir di PT Sarana Lindung Upaya, sebuah perusahaan asuransi yang kala itu tengah mengalami kesulitan sebab telah



mendapatkan sanksi pembatasan kegiatan usaha dari regulator. Dia pun terlibat dalam periode pemulihan perusahaan tersebut dengan menjabat sebagai direktur operasional.

Pada masa itu, Dody mengakui mulai intens berkomunikasi dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penyehatan keuangan.

“Saya mendapat tawaran dari teman yang menjadi dirut di situ untuk bergabung memperbaiki perusahaan. Benar-benar mulai dari nol sampai selesai pemulihan, tetapi pada fase produksi saya mengundurkan diri.”

Setelah beristirahat dua bulan, Dody kemudian bergabung dengan PT Asuransi Binagriya Upakara sebagai technical adviser untuk pengembangan produk pada pertengahan 2017. Namun, dia hanya mengisi posisi itu selama beberapa bulan.

Pada Oktober 2017, Dadang Sukresna, Direktur Utama PT Asuransi Binagriya Upakara yang juga menjabat sebagai Ketua AAUI meminta Dody untuk mengisi posisi direktur eksekutif yang ditinggalkan Julian Noor setelah ditunjuk menjadi Direktur Utama PT Asuransi Adira Dinamika.

“Untuk menjadi direktur eksekutif AAUI memang syaratnya mesti meninggalkan jabatan di perusahaan asuransi.”

Pengembangan SDM & Riset Sebagai Passion

Keterlibatan di asosiasi memang tidak menjadi hal baru bagi Dody. Sejak bekerja di Bumida, jelasnya, ia telah ikut serta untuk mengembangkan sejumlah divisi, mulai dari departemen statistik dan tarif, bidang teknik, hingga departemen literasi.

Dia mengakui ketika menjadi ketua departemen literasi AAUI, dirinya banyak terlibat dalam proses edukasi masyarakat hingga ke berbagai daerah bersama bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Otoritas Jasa Keuangan. “AAUI waktu itu menjadi yang pertama membuat departemen SDM & literasi. Kami banyak berkolaborasi dengan OJK, sebab ada banyak program.”

Pengembangan SDM memang telah menjadi minat utama Dody di industri asuransi. Setelah menjabat direktur eksekutif, dia mengatakan pihaknya masih akan melanjutkan sejumlah program untuk meningkatkan kualitas pelaku industri, terutama bagi para SDM-nya.

Selain itu, Dody mengatakan pihaknya pun akan mulai mengembangkan riset yang akan sangat bermanfaat bagi

Terbitnya payung hukum perlindungan dan pemberdayaan petani menjadi momentum pengembangan asuransi usaha tani padi dan berbagai asuransi untuk ketahanan pangan hingga saat ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan, misalnya, telah menghadirkan produk asuransi nelayan.

pelaku industri. Pihaknya bakal menggandeng sejumlah institusi pendidikan asuransi, seperti Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi (STMA) Trisakti dan Sekolah Tinggi Manajemen Risiko & Asuransi (STIMRA).

Apalagi, Dody kini juga menjadi pengajar di kedua institusi pendidikan tersebut. “Riset ini yang dulu belum sempat dikerjakan oleh Pak Julian Noor. Ini saya mau galakkan.”

Ketahanan Pangan

Sebagai sarjana perikanan, Dody mengakui ilmu yang dipelajarinya

di bangku perkuliahan ternyata juga tetap berguna bagi pengembangan industri asuransi. Dia mengatakan sudah terlibat jauh dalam pengembangan konsep asuransi usaha tani padi, yang merupakan cikal bakal program asuransi ketahanan pangan.

Ketika melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Institut Pertanian Bogor, jelasnya, seorang peneliti dari kampus tersebut, yang juga menjadi staf khusus di Kementerian Pertanian, mengajaknya untuk membantu penelitian terkait tema tersebut.

“Waktu itu saya menjabat Kepala Divisi Teknik Bumida, dan Bumida sudah menerbitkan polis asuransi tentang usaha padi. Itu pertama kali ada polis itu di industri asuransi umum.”

Proses penelitian itu, jelasnya, berlanjut dengan pembahasan materi yang lebih masif dengan melibatkan Kementerian Pertanian, Bank Indonesia, dan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Proses pengembangan konsep itu pun sejalan dengan upaya Dewan Perwakilan Rakyat yang tengah menggodok rancangan undang-undang tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

Terbitnya payung hukum perlindungan dan pemberdayaan petani menjadi momentum pengembangan asuransi usaha tani padi dan berbagai asuransi untuk ketahanan pangan hingga saat ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan, misalnya, telah menghadirkan produk asuransi nelayan.

Dody mengatakan dirinya terlibat jauh dalam pengembangan produk asuransi tambak udang dan pembentukan konsorsiumnya. Ke depan, jelasnya, ia bersama AAUI dan OJK tengah mematangkan konsep asuransi usaha ikan Bandeng, Patin dan Nila.

“Ternyata ada juga gunanya ilmu saya di sini. Setelah sekian tahun baru terpakai,” kata Dody sembari tertawa. ●

Mendorong Pasar Modal Sebagai Sumber Pembiayaan Jangka Panjang

Gemilangnya pencapaian kinerja pasar modal pada 2017, menjadi pijakan bagi otoritas pasar modal untuk melanjutkan arah kebijakan pengembangan pembiayaan jangka panjang.

Sepanjang 2017, penghimpunan dana dari pasar modal mencapai Rp264 triliun dengan rincian Rp254 triliun melalui penawaran umum yang dilakukan oleh 130 emiten, dan Rp10 triliun dari produk pengelolaan investasi. Dari sisi pertambahan jumlah emiten, terdapat penambahan 46 emiten baru atau meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan 2016 yang hanya 20 emiten.

Seiring dengan momentum percepatan pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan sokongan pendanaan jangka panjang, raihan penghimpunan dana melalui pasar modal pada 2018 diharapkan semakin meningkat.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, peran pasar modal ke depan akan semakin penting dalam upaya untuk memfasilitasi penyediaan pembiayaan jangka panjang. “Pengembangan instrumen-instrumen investasi jangka panjang, ketersediaan likuiditas yang cukup, serta ketersediaan infrastruktur penunjang di pasar modal merupakan beberapa area prioritas yang akan didorong untuk dapat direalisasikan pada tahun

2018,” katanya saat memberikan sambutan di acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan bertajuk ‘Memacu Pertumbuhan’ di Jakarta, Kamis (18/01).

Wimboh menjelaskan bahwa salah satu upaya yang akan ditempuh untuk meningkatkan peran pasar modal sebagai sumber pendanaan bagi dunia usaha adalah dengan mengeluarkan kebijakan penyederhanaan persyaratan dokumen dan alur proses bagi perusahaan dalam menyampaikan pernyataan pendaftaran penawaran umum efek bersifat utang dan sukuk, di mana penawaran umum tersebut hanya ditujukan kepada pemodal profesional (institusional dan besar).

Dari sisi instrumen pembiayaan, jelasnya, OJK akan memperluas dan meningkatkan pemanfaatan instrumen pembiayaan yang lebih bervariasi antara lain *perpetual bonds*, *green bonds*, dan obligasi daerah. “Termasuk penerbitan ketentuan pengelolaan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) melalui skema Kontrak Investasi Kolektif,” jelasnya.

Adapun dari sisi teknis proses penawaran umum, Wimboh menyampaikan bahwa OJK akan

melakukan modernisasi dan percepatan proses penawaran umum melalui *Electronic Registration (e-Reg)*, serta menerapkan *Electronic Book Building (e-Book Building)*. “Pelaksanaan proses *e-Book Building* diharapkan dapat memperbesar partisipasi investor ritel di masa yang akan datang,” jelasnya.

Lebih lanjut, dalam rangka meningkatkan efisiensi penyelesaian transaksi di bursa efek, OJK akan mendorong implementasi percepatan penyelesaian transaksi di bursa efek dari yang semula T+3 menjadi T+2.

Dari sisi distribusi dan akses keterjangkauan investor, OJK pada tahun ini akan mendorong keterlibatan pelaku ekonomi khususnya lembaga jasa keuangan dan profesional di daerah, termasuk potensi penciptaan lapangan kerja di daerah. “OJK akan mengeluarkan kebijakan mengenai pendirian Perusahaan Efek Daerah,” jelas Wimboh.

Dengan adanya Perusahaan Efek Daerah, menurutnya, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan-perusahaan di daerah, terutama terkait dengan akses pendanaan melalui pasar modal.

Saat memberikan sambutan, Presiden Joko Widodo mengakui

Lima Kebijakan Strategis OJK 2018



Mendorong perluasan dan pemanfaatan instrumen pembiayaan yang lebih bervariasi, antara lain *perpetual bonds, green bonds, dan obligasi daerah, termasuk penerbitan ketentuan pengelolaan dana Tapera melalui skema Kontrak Investasi Kolektif.*

Mempermudah proses penawaran umum Efek bersifat utang dan sukuk bagi pemodal profesional.

Meningkatkan akses bagi investor domestik serta keterlibatan pelaku ekonomi khususnya lembaga jasa keuangan di daerah melalui penerbitan kebijakan pendirian Perusahaan Efek Daerah.

Meningkatkan proses penanganan perizinan dan penyelesaian transaksi yang lebih cepat dengan menggunakan teknologi.

Menghilangkan kewajiban pembentukan margin 10% untuk transaksi hedging nilai tukar.

Sumber: OJK, diolah

pentingnya pendanaan alternatif, salah satunya melalui pasar modal, untuk pembangunan infrastruktur agar tak membebani kas negara. “Kami akan terus mendorong BUMN, BUMD, dan perbankan di pusat dan daerah untuk mencari model-model pembiayaan alternatif yang kreatif, terutama dalam pembiayaan infrastruktur,” tuturnya.

Menurutnya, saat ini merupakan momentum yang tepat mengakses pendanaan dari pasar modal seiring dengan kinerja pasar modal yang bagus.

Relaksasi Pajak

Sebagai pemanis, Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2B OJK Djustini Septiana mengungkapkan pihaknya tengah bernegosiasi dengan Kementerian Keuangan tentang penurunan tarif pajak bagi investor yang membeli *green bonds* dan perusahaan penerbit *green bonds*.

Selain relaksasi pajak, jelasnya, OJK juga tengah bernegosiasi untuk melakukan pemotongan pungutan iuran OJK dan diskon dalam biaya listing bagi calon emiten.

Head of Investment Division BNI Asset Management Susanto

Chandra menyatakan, salah satu regulasi yang ditunggu oleh industri adalah akses instrumen efek di luar negeri bagi perusahaan manajer investasi. Menurutnya, pasar modal Indonesia akan memasuki pasar bebas sehingga harus lebih terbuka terhadap instrumen efek luar negeri. Terlebih, partisipasi investor lokal terus meningkat.

Dia menambahkan, akses instrumen efek di luar negeri tersebut akan membuat variasi produk investasi lebih banyak.

Kepala Ekonom PT Bank Bukopin Tbk. Sunarsip menilai, berkembangnya pembiayaan dari pasar modal, bukan berarti telah menggeser peran perbankan. Dia menjelaskan bahwa meski pembiayaan dari pasar modal tumbuh besar, tetapi secara jumlah belum bisa mengimbangi kredit perbankan. “Jadi bank dan pasar modal pun belum bisa dikatakan bersaing,” jelasnya.

Menurutnya, salah satu pertimbangan sebuah perusahaan mencari pendanaan dari pasar modal adalah terkait batas maksimal pemberian kredit (BMPK) dan persyaratan pengajuan kredit bank.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito

Sulistio melihat terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi pelaku pasar modal pada tahun ini. *Pertama*, keputusan bank sentral Amerika Serikat (AS) untuk menaikkan suku bunga acuan.

Kedua, agresivitas negara tetangga, terutama China dan Arab Saudi. Kedua negara tersebut sejauh ini cukup agresif untuk mendatangkan perusahaan berkapitalisasi besar untuk melantai di bursa. Kebijakan tersebut otomatis berpotensi mendilusi kapitalisasi pasar saham Indonesia.

Ketiga, porsi investasi yang masuk ke Indonesia, dikaitkan dengan sejumlah agenda yang akan digelar pada tahun ini di antaranya adalah Pilkada serentak dan Asian Games. Menurut Tito, secara historikal Pemilu tidak akan mengganggu stabilitas pasar modal, tapi yang dikhawatirkan adalah adanya kemungkinan penarikan uang secara besar-besaran.

Dengan berbagai inovasi, efisiensi, dan relaksasi yang dilakukan oleh otoritas pasar modal, mudah-mudahan kinerja pasar modal tahun ini kembali cemerlang, sehingga berkontribusi besar terhadap pembiayaan jangka panjang. ●



RENCANA BISNIS BANK (RBB) Bankir dan Regulator Lebih Optimistis

Banyak kalangan meyakini pertumbuhan ekonomi pada 2018 akan lebih bergairah dibandingkan dengan 2017. Harapan yang sama juga tumbuh di dalam industri perbankan. Padahal, tahun lalu penyaluran kredit perbankan masih terbilang loyo.

Sedikit menilik ke belakang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Statistik Perbankan Indonesia mencatat jumlah kredit yang diberikan bank umum per akhir Desember 2017 sebesar Rp4.782 triliun. Realisasi itu tumbuh 8,35% secara tahunan, lebih rendah dari target semula sebesar 13%, bahkan di bawah target yang telah revisi pada pertengahan tahun lalu sebesar 11%.

Loyonya kredit perbankan, banyak dikaitkan dengan lesunya permintaan dari para debitur, terutama korporasi di sektor tertentu. Selain itu, faktor proses konsolidasi juga dinilai sebagai penyebab kredit belum tumbuh optimal.

Perbankan diuntungkan dengan efisiensi beban biaya dana dan beban pencadangan. Dua hal tersebut membuat bank, khususnya Bank

Umum Kelompok Usaha (BUKU) IV dan III mampu mendulang untung lebih besar pada tahun lalu.

Pada tahun ini, harapan kembali merekah, baik dari sisi pemerintah maupun pelaku industri. Perbankan diharapkan dapat lebih kencang menyalurkan kredit dan pembiayaan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Berdasarkan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang disetorkan para bankir, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana memperkirakan, penyaluran kredit dan dana pihak ketiga (DPK) perbankan pada tahun ini berpotensi tumbuh dua digit di kisaran 10%-12%.

OJK memandang kredit akan lebih positif dengan target pertumbuhan ekonomi di level 5,4% yang ditetapkan pemerintah di 2018. Kendati begitu, perkiraan OJK tersebut pada dasarnya cenderung lebih konservatif dibandingkan dengan industri jasa keuangan.

Heru menyatakan, dalam RBB 2018, pertumbuhan kredit dan DPK ditargetkan masing-masing sebesar 12,23% dan 11,16%. “Target *outlook* pertumbuhan kredit 2018 sebesar 10%-12%, tetapi kalau dalam RBB industri lebih positif, mereka targetkan pertumbuhan sebesar 12,23%. Ini mencerminkan optimisme mereka menghadapi 2018 dengan kondisi ekonomi yang diharapkan akan lebih baik,” kata Heru saat jumpa pers Kinerja Industri Jasa Keuangan akhir tahun 2017 di Jakarta.

Dia beralasan, upaya konsolidasi dan restrukturisasi kredit bermasalah yang telah dilakukan perbankan dalam beberapa tahun lalu akan membuat beban bank lebih ringan. Apalagi tingkat risiko kredit semakin terkendali dengan tren rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/ NPL*) yang menurun.

NPL gross perbankan turun dari 2,93% akhir 2016 menjadi 2,59% akhir Desember 2017. “Artinya mereka sudah selesai dengan dirinya

sendiri dan lebih percaya diri dengan konsolidasi selama 2017 yang sudah mereka lakukan. Dampaknya akan mulai dirasakan pada tahun ini,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso dalam beberapa kesempatan kerap menyampaikan bahwa tahun ini adalah momentum untuk memacu pertumbuhan melalui industri jasa keuangan. Hal itu kembali disuarakannya dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2018 yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo, pada medio Januari 2018.

Wimboh menegaskan, kondisi makro ekonomi dan sektor jasa keuangan terbilang kondusif dan menjadi momentum yang pas untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator dari bangkitnya kondisi ekonomi domestik dan luar negeri yakni dilihat dari harga komoditas yang semakin meningkat.

“Perbankan mengalami kendala terutama karena harga komoditas yang sempat *jeblok*. Sekarang momentumnya karena harga komoditas sudah meningkat secara gradual dan ekonomi luar negeri sudah membaik sehingga *room* untuk mengekspor barang komoditas bisa lebih besar lagi di 2018,” katanya dalam pertemuan itu.

Di sisi industri sendiri, kondisinya sangat solid baik dari sisi permodalan

Sekarang momentumnya karena harga komoditas sudah meningkat secara gradual dan ekonomi luar negeri sudah membaik sehingga *room* untuk mengekspor barang komoditas bisa lebih besar lagi di 2018.

dan likuiditas maupun tingkat risiko yang terkendali. Rasio kecukupan permodalan (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) perbankan, misalnya, ada di *level* 23,36%. Kuatnya permodalan perbankan itu juga diikuti dengan likuiditas yang memadai.

Rasio Alat Likuid per *Non Core Deposit* (AL/NCD) perbankan per Desember 2017 tercatat sebesar 90,48%, di atas *threshold* sebesar 50%. Sementara itu *excess reserve* perbankan di kisaran Rp626 triliun.

Dengan situasi perbaikan ekonomi dunia dan domestik serta kesiapan di sisi industri, Wimboh yakin kinerja perbankan akan lebih ekspansif. Tak hanya dari sisi kredit korporasi, pengaruh tahun politik pada 2018-2019 juga diperkirakan akan membuat kredit ritel dan konsumsi meningkat pesat.

Walau realisasi tahun lalu belum sesuai harapan, kalangan bankir tak kehilangan optimisme. Malahan ekspektasi yang belum terpenuhi tahun lalu diharapkan dapat terwujud

pada tahun ini. Penyaluran kredit perbankan pada tahun depan diperkirakan akan lebih positif dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun ini.

Salah satu bank yang sangat optimistis mencetak *loan growth* dua digit yakni PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Direktur Utama BTN Maryono menuturkan, tahun ini pihaknya membidik kenaikan kredit di *level* 22% -25%, di atas RBB industri.

Sepanjang tahun lalu, bank spesialis kredit perumahan itu memang mampu menyalurkan pembiayaan dan kredit sebesar Rp164,45 triliun, tumbuh di *level* 21% secara tahunan, jauh di atas rata-rata industri.

Sebagai bank penyalur Program Satu Juta Rumah, pertumbuhan kredit bank pelat merah itu memang banyak ditopang oleh program KPR Subsidi. “RBB 2018 kami asumsikan meningkat dengan kredit di atas 20% dan laba di atas 24%,” kata Maryono. ●



Bank Run dan Kondisi Likuiditas Perbankan



Bank run adalah penarikan dana nasabah yang secara masif terjadi di industri perbankan. *Bank run* berbeda dengan *bank rush*. *Bank rush* adalah penarikan dana nasabah yang terjadi pada individu bank, tidak terjadi secara industri.

Indikator *bank run* apabila pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) negatif secara bulanan atau *month to month* (mtm). Berdasarkan kompilasi dari data Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, dalam 23 tahun terakhir industri keuangan mengalami lima periode *bank run*.

Peristiwa *bank run* terparah terjadi pada rentang 1997, 1998, dan 1999. *Bank run* terparah terjadi pada 1998, saat terjadi pergantian era orde baru ke orde reformasi.

Kemudian, *bank run* kembali terjadi pada era pemerintahan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid, yakni pada November 2001. *Bank run* pada era reformasi terjadi pada November 2007 hingga September 2008, saat krisis global mendera Indonesia.

Pada Juli 2014 dan Maret 2016 kondisi perbankan Indonesia sempat mendekati area *bank run* atau berpotensi *bank run*. Namun, kondisi masih terjaga hingga posisi Desember 2017 yang mencatatkan pertumbuhan DPK cukup signifikan.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dana perbankan pada Desember 2017 tercatat sebesar Rp5.289 triliun atau tumbuh 9,35% *year on year* (yoy). Pertumbuhan dana lebih besar dibandingkan dengan kredit. Kredit perbankan pada Desember 2017 tercatat sebesar Rp4.782 triliun atau tumbuh sebesar 8,35% *yoy*.

Pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan, Kamis (18/1), Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso menyampaikan bahwa fundamental industri perbankan cukup kuat. Bahkan, cenderung mengalami eksekusi likuiditas.

Hal itu terlihat dari kondisi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan tercatat sebesar 23,36% per Desember 2017.

Kuatnya permodalan perbankan ini juga diikuti dengan likuiditas

yang memadai. Pada Desember 2017, rasio Alat Likuid per *Non Core Deposit* (AL/NCD) perbankan tercatat sebesar 90,48%, di atas threshold sebesar 50%.

Sementara *excess reserve* perbankan tercatat dikisaran Rp626 triliun.

Ekses dana industri perbankan itu tercatat lebih dari 32% dari total simpanan perbankan Rp5.289 triliun. Kondisi likuiditas pun melonggar yang terlihat dari rasio *loan to deposit ratio* menjadi 90,4% dibandingkan dengan periode sebelumnya 91,26%.

Ketika likuiditas memperhitungkan kepemilikan surat berharga (*loan to funding ratio*), dana bank kian melimpah yakni 82,62%. Wimboh menambahkan bahwa kondisi perbankan saat ini pada posisi prima sehingga momentum yang tepat untuk melakukan ekspansi.

Namun, ungkapnya, yang perlu digerakkan saat ini adalah merangsang pertumbuhan ekonomi untuk mendorong permintaan kredit di lapisan masyarakat. ●

Memandu Kehati–Hatian Bank Lewat BMPK

Bank wajib menerapkan prinsip kehati–hatian dalam menyalurkan kredit. Oleh karena itu, bank harus melakukan mitigasi risiko untuk mengantisipasi gagal bayar yang berdampak pada kenaikan rasio kredit bermasalah.

Prinsip kehati-hatian yang diterapkan, seperti penyebaran risiko dan diversifikasi portofolio sumber dana, terutama kepada pihak terkait maupun kepada pihak tidak terkait dalam persentase tertentu dari modal bank. Hal itu dikenal dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Menurut peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 yang kemudian diadopsi pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), BMPK adalah persentase maksimal penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal

bank yang berupa modal inti atau modal pelengkap bagi bank yang berkantor pusat di dalam negeri maupun dana bersih kantor pusat dan kantor-kantor cabang di luar negeri (*net head office fund*).

Mengingat terdapat hubungan yang signifikan antara kegagalan usaha bank dengan konsentrasi penyediaan dana, maka bank dilarang untuk mengucurkan dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPK.

Di samping larangan dan pembatasan dari permodalan, bank wajib menerapkan manajemen risiko kredit yang lebih hati-





Pemberian kredit diberikan kelonggaran atau pengecualian dalam penerapan BMPK, seperti penyediaan dana kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bidang usahanya mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

hati kepada pihak terkait maupun peminjam atau kelompok peminjam yang memiliki eksposur besar.

Hal utama dalam pengaturan BMPK adalah penyediaan dana kepada pihak terkait ditetapkan maksimum 10% dari modal bank, penyediaan dana kepada satu peminjam yang bukan pihak terkait maksimum 20% dari modal bank, dan penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam yang bukan pihak terkait maksimum 25% dari modal bank.

Namun, secara operasional, apabila ada pengaruh eksternal yang membuat penyaluran kredit melampaui batas maksimum, misal disebabkan oleh penurunan modal bank, perubahan nilai tukar, dan perubahan nilai wajar, hal itu dapat dikatakan tidak melanggar.

Tingginya peranan intermediasi dalam perekonomian nasional, meskipun ada pembatasan dalam penyaluran kredit, bank tetap didorong untuk memberikan pembiayaan di atas BMPK untuk sektor atau kelompok tertentu dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pemberian kredit diberikan kelonggaran atau pengecualian dalam penerapan BMPK, seperti penyediaan dana kepada Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) yang bidang usahanya mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Hal itu termasuk pada pembangunan infrastruktur, penyediaan dana yang dijamin oleh *prime* bank dan lembaga pembangunan multilateral, serta penyediaan dana kepada nasabah dengan pola kemitraan inti plasma. Di samping itu, sejalan dengan upaya konsolidasi perbankan, penyertaan modal kepada bank lain dapat tidak diperhitungkan dalam BMPK.

Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Ahmad Siddik Badruddin menilai, peraturan BMPK sudah cukup ideal untuk mendorong intermediasi dengan mengindahkan prinsip kehati-hatian. “Itu kami kan semua bank harus patuh tidak ada pengecualian apapun tidak ada relaksasi apapun bank harus sehat,” ujarnya saat dihubungi, baru-baru ini.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Achmad Baiquni mengakui bahwa dengan banyaknya proyek infrastruktur yang dikerjakan perusahaan pelat merah dan dibiayai oleh kelompok bank pelat merah juga membuat ruang kredit mulai menyempit mendekati BMPK. “Namun, itu bukan berarti ruang

penyaluran kredit dari kami kepada mereka [perusahaan BUMN] menjadi terbatas. Ruang penyaluran kredit untuk mereka sejauh ini masih *lowong*,” ujarnya saat dihubungi belum lama ini.

Baiquni menjelaskan, debitur pelat merah juga mencari sumber pendanaan lain di luar kredit bank seperti beberapa waktu terakhir dengan menerbitkan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) dan instrumen lainnya. “Dana dari itu kan bisa buat membayar kredit kepada kami sehingga ruang kredit baru juga terbuka lebar. Untuk itu, dengan semakin dalam pasar keuangan, berarti semakin luas juga ruang bank menyalurkan kredit,” jelasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana sebelumnya menyebutkan bahwa terkait dengan BMPK, ke depan masih akan berpegang kepada tingkat intermediasi perbankan (*loan to deposit ratio*). “Ya kalau kami berpegang pada *loan to deposit ratio* untuk kemampuan dia sebagai daya dorong tidak luas. Ini kami sedang memikirkan *loan to financing* supaya rasio lebih longgar, nanti kami evaluasi itu,” ujarnya saat wawancara, awal Januari 2018. ●

Mempermudah Akses Permodalan UKM & Start Up

Meski skala usahanya tak besar, pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) tetap memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.

Dengan adanya UKM ini, tingkat pengangguran akibat tak terserapnya angkatan kerja oleh industri besar menjadi berkurang. Selain itu, sektor UKM juga tercatat sebagai salah satu sektor usaha yang tahan banting terhadap dampak krisis keuangan global.

Di zaman *now*, istilah pelaku UKM pun berkembang dengan lahirnya istilah perusahaan rintisan atau *start up*. Umumnya, perusahaan *start up* ini bergerak di sektor teknologi dan informasi dengan jasa layanan aplikasi.

Sadar akan peran penting UKM dan *start up* tersebut, otoritas pasar modal dan fiskal pun memberikan perhatian khusus terhadap pelaku UKM. Dari sisi fiskal misalnya, pemerintah berencana menurunkan tarif PPh final UKM dari 1% menjadi 0,5%. Lalu dari aspek permodalan, pemerintah juga telah

memberikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga yang sangat kompetitif.

Pada saat bersamaan, otoritas pasar modal juga berupaya mempermudah persyaratan bagi UKM dalam mengakses permodalan dari pasar modal. Pasalnya, selama ini sumber permodalan UKM hanya berasal dari perbankan atau modal ventura yang tingkat bunganya lumayan tinggi.

Sebagai langkah konkritnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merevisi peraturan untuk lebih memudahkan UKM mendapatkan *fund raising* dari pasar modal melalui penawaran umum perdana (*Initial Public Offering/IPO*) saham. Aturan yang direvisi tersebut adalah POJK No. 53/POJK.04/2017 dan POJK No. 54/POJK.04/2017.

Melalui revisi yang terbit pertengahan tahun lalu itu, kini perusahaan skala





kecil dengan aset maksimum Rp50 miliar bisa masuk pasar modal dan dikategorikan sebagai perusahaan publik skala kecil dengan plafon pendanaan hingga Rp50 miliar. Adapun, perusahaan skala menengah yakni dengan aset antara Rp50 miliar-Rp250 miliar dikategorikan sebagai perusahaan publik skala menengah dengan plafon pendanaan hingga Rp250 miliar.

Setidaknya ada enam insentif yang diberikan OJK bagi UKM yang menawarkan saham di pasar modal yakni *Pertama*, laporan keuangan yang disajikan dalam prospektus untuk perusahaan skala kecil hanya setahun terakhir, perusahaan skala menengah 2 tahun terakhir. Syarat ini lebih mudah dibandingkan dengan ketentuan perusahaan umum yakni selama 3 tahun.

Kedua, untuk perusahaan kecil dan menengah, penerbitan prospektus awal tidak diatur, sedangkan untuk perusahaan umum berlaku kewajiban menerbitkan prospektus awal. *Ketiga*, publikasi prospektus ringkas beserta perubahannya di koran Indonesia tidak diwajibkan untuk perusahaan skala kecil dan menengah, tetapi diwajibkan untuk perusahaan umum.

Keempat, perusahaan skala kecil dan menengah tidak diatur ketentuan mengenai pengungkapan pajak dan

ketentuan penting dalam Anggaran Dasar pada Prospektus. Sementara itu, ketentuan tersebut berlaku bagi perusahaan umum.

Kelima, *comfort letter* dan surat pernyataan manajemen dalam bidang akuntansi sebagai dokumen Pernyataan Pendaftaran tidak wajib untuk perusahaan skala kecil dan menengah. Aturan ini wajib bagi perusahaan umum.

Keenam, ketentuan terkait tata kelola di mana untuk perusahaan skala kecil bisa kurang sampai 12 bulan sejak efektif, sedangkan untuk perusahaan skala menengah ketentuan terkait tata kelola bisa kurang sampai 6 bulan sejak efektif.

Dalam proses pencatatannya, Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menyediakan dua papan pencatatan yakni papan pengembangan dan papan utama.

Bagi UKM yang masa operasionalnya minimum 12 bulan, masih rugi, dan aktiva berwujud bersih minimum Rp5 miliar, maka akan menempati papan pengembangan. Sementara itu, bagi UKM yang masa operasionalnya minimum 36 bulan, sudah mencatatkan laba usaha minimum 1 tahun, dan aktiva berwujud bersih minimum Rp1 miliar, maka akan menempati papan utama.

Sebagai persiapan masuk pasar modal, BEI juga sudah menciptakan

IDX Incubator yang berfungsi sebagai wadah edukasi dan pembinaan seputar kewirausahaan dan pasar modal bagi pelaku UKM dan *start up*.

Di pihak lain, BEI juga tengah merevisi Peraturan I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar. Salah satu konsep penting yang akan dimasukkan dalam revisi ini adalah perusahaan UKM dan *start up* bisa terlebih dahulu melakukan proses penawaran umum saham di pasar modal untuk mendapatkan penilaian publik atas sahamnya, tanpa harus memiliki aktiva berwujud bersih yang memadai yakni Rp5 miliar.

Bila ternyata hasil IPO menunjukkan kapitalisasi pasarnya memenuhi syarat minimal yang ditetapkan bursa, calon emiten bisa *listing* di bursa. Akan tetapi, bila tidak memenuhi syarat minimal, perusahaan tersebut bisa tetap menjadi perusahaan publik tetapi sahamnya tidak *listing*.

Konsep lainnya adalah calon emiten harus memiliki minimum pendapatan atau minimum kapitalisasi pasar. Praktik ini sudah lazim diterapkan di berbagai bursa di luar negeri. Artinya, bila calon emiten tidak memiliki aktiva berwujud memadai, pendapatan mereka harus lebih tinggi dari persyaratan yang ditetapkan bursa.

Tak bisa dipungkiri memang selama ini, masalah permodalan telah menjadi momok seseorang untuk menjadi wirausaha. Kini, momok itu pun perlahan mulai pudar dengan hadirnya fasilitas kemudahan bagi UKM dan *start up* untuk mengakses permodalan di pasar modal yang lebih murah.

Pada akhirnya, dengan semakin mudahnya akses permodalan bagi UKM dan *start up*, diharapkan minat berwirausaha menjadi semakin tinggi, sehingga menjamurnya sektor UKM dan *start up* dapat menjadi penopang perekonomian Indonesia agar tahan banting terhadap gejolak ekonomi global. ●

Lebih Mudah & Murah dengan Jasa Pembiayaan

Fenomena angkutan umum berbasis daring (layanan *online*) menjadi fenomena tersendiri di Indonesia, bahkan perkembangannya pesat dengan berbagai layanan tambahan untuk menyenangkan dan memudahkan konsumen.





Di sejumlah daerah, seperti Yogyakarta, mulai banyak masyarakat yang mengandalkan layanan angkutan umum berbasis *online* ini, baik roda dua maupun roda empat. Hal ini pula yang membuat Ismanto, 47 tahun, warga Sidoarum Yogyakarta turut menjajal peruntungan di layanan taksi *online*.

Ismanto sengaja membeli mobil *Low Cost Green Car* (LCGC) secara kredit dengan menggunakan jasa perusahaan pembiayaan. “Kebetulan saya juga enggak punya mobil. Lumayan, bisa dipakai pribadi dan juga bisa dipakai untuk taksi *online*,” ujar Ismanto, belum lama ini.

Pria yang sehari-hari bekerja di salah satu perusahaan swasta di Yogyakarta ini, setiap pagi, mobil yang dibelinya itu dipakai untuk layanan taksi *online*. “Yang bawa adik saya. Saya kalau sore saja atau malam,” ungkapnya.

Baginya, membeli mobil secara kredit relatif meringankan. Dengan cicilan yang terjangkau, dia dapat memiliki mobil yang bisa dipakai juga untuk menambah pemasukan keluarga. Apalagi syarat untuk bisa mengakses kredit relatif mudah. “Saya *sih* enggak pilih-pilih, pokoknya yang ada di diler aja saya pilih.”

Dari sisi kinerja, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) perusahaan pembiayaan berada pada kisaran 2,96%. Rasio NPF perusahaan pembiayaan mengalami penurunan atau perbaikan. Pasalnya, data OJK menunjukkan pada Desember 2016, rasio NPF perusahaan pembiayaan berada pada kisaran 3,26%.

Namun, OJK optimistis tren perbaikan rasio kredit bermasalah (NPF) di industri pembiayaan masih dapat berlanjut sepanjang 2018. Pemulihan kinerja sektor pertambangan dinilai memberikan ruang bagi perbaikan kualitas kredit *multifinance*.

Menurut Y. Santoso Wibowo, Deputy Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Terintegrasi OJK, memburuknya kualitas pembiayaan sektor *multifinance* pada beberapa tahun lalu sangat terkait dengan kondisi sektor pertambangan. Dia menyatakan, pada saat itu nilai investasi pengadaan alat berat melandai.

Pada saat yang sama, kolektibilitas kredit juga tersendat. “Harga batu bara *drop*, sehingga pinjaman banyak yang sulit dikembalikan, NPF pun menurun,” jelasnya, Kamis (1/3).

Kendati demikian, Santoso menilai, momentum pemulihan kinerja sektor pertambangan sejak tahun lalu memberikan peluang kepada asuransi untuk terus berekspansi dan memperbaiki kualitas pembiayaannya.

Melihat perkembangan tersebut, memang masih terbuka peluang besar bagi perusahaan pembiayaan untuk tetap memperbesar porsi layanan pembiayaannya bagi pembelian kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor. Bahkan jika dilihat tren penjualan mobil saja sepanjang 2017, menurut Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) masih bertumbuh 1,6% dibandingkan dengan dengan capaian pada tahun sebelumnya menjadi lebih dari 1.079 juta unit.

Berdasarkan data Gaikindo, peningkatan penjualan tersebut terutama didongkrak oleh tiga segmen terbesar yang mencatat kenaikan penjualan. Ketiga segmen itu adalah mobil harga terjangkau dan ramah lingkungan (LCGC) dan *city car*, kendaraan kecil serbaguna (LMPV), dan kendaraan niaga pikap.

Ketiga segmen tersebut sepanjang tahun lalu mengontribusi penjualan hingga 61,15%. ●

MENGAPA PERLU HATI-HATI PADA



Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat, inovasi produk pun menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalamnya.

Salah satunya adalah inovasi pada mata uang. Ciri khas teknologi yang tak mengenal lintas batas negara, membuat mata uang yang lazimnya didasarkan pada bentuk fisik dan identitas negara, kini menjelma menjadi mata uang yang bersifat digital atau istilah kerennya *cryptocurrency*.

Mata uang digital ini sudah ada lebih dari 1 dekade di mana perkembangannya pun cukup masif. Mengutip data dari *Coinmarketcap.com*, saat ini ada 904 jenis mata uang kripto di mana salah satu yang paling populer adalah Bitcoin. Mata uang virtual yang ditemukan oleh Satoshi Nakamoto ini sekaligus menjadi inisiator lahirnya jenis-jenis *cryptocurrency* baru lainnya.

Berhubung namanya adalah mata uang digital, maka transaksinya pun dilakukan melalui jaringan daring (*online*). Sistem kerjanya pun bersifat terdesentralisasi di mana mata uang virtual ini terhubung dengan para penggunanya secara langsung tanpa melalui perantara atau otoritas berwenang.

Dengan demikian, transaksi mata uang virtual ini cukup dengan *smartphone* atau komputer yang terhubung dengan Internet. Dalam bertransaksi, tak ada batasan waktu,

tempat, atau jarak. Meski tak melalui pengawasan otoritas berwenang, mata uang digital ini menggunakan kriptografi untuk keamanan agar tidak dapat dipalsukan.

Hukum *supply and demand* sangat berperan dalam menentukan pergerakan nilai harga *cryptocurrency* ini di mana kekuatan *buy and sell* adalah kuncinya. Tidak ada pihak penjamin atau otoritas yang bertugas menjaga stabilitas nilai tukarnya seperti mata uang fisik pada umumnya.

Di Indonesia, mata uang digital yang menyita perhatian otoritas moneter, otoritas pasar modal, hingga otoritas fiskal adalah Bitcoin. Nilai tukarnya yang terus melambung membuat mata uang digital ini menjadi mata uang dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia.

Menurut data Bank Indonesia, kapitalisasi pasar Bitcoin saat ini mencapai US\$246 miliar, mengalahkan mata uang digital lain seperti *ethereum* dan *ripple* yang masing-masing hanya US\$133 miliar. Mengutip dari *Bloomberg*, pada 2017 nilai bitcoin melesat dari US\$1,000 hingga US\$19,000, dengan besaran volatilitas ribuan dolar per harinya.

Namun, per Kamis (18/1), nilai bitcoin sudah terkoreksi ke level

US\$11.790 seiring dengan resistensi dari otoritas moneter di berbagai negara. Meski pada awal Februari 2018 nilai Bitcoin sempat merosot ke bawah US\$6.000, tetapi pada Selasa (20/2), nilai Bitcoin telah merangkak naik menghampiri level US\$12.000.

Iming-iming imbal hasil tinggi dari fluktuasinya yang bak *rollercoaster* tersebut, membuat peminat mata uang digital di Indonesia justru terus bertambah.

Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Ida Nuryanti mengatakan, jumlah *trader* Bitcoin di Indonesia lebih dari 1 juta orang. Padahal, di sisi lain, BI telah melarang penggunaan bitcoin sebagai alat transaksi ataupun investasi. "Makanya kami lakukan sosialisasi supaya tidak ada lagi pemain baru," katanya, Jumat (26/1).

Menurutnya, investasi pada Bitcoin sangat berisiko dan sarat akan spekulasi, karena tidak ada otoritas yang bertanggungjawab dan tak ada administrator resmi. "Posisi BI jelas, bahwa Bitcoin bukan merupakan alat pembayaran yang sah sesuai UU Mata Uang dan peringatan agar semua pihak tidak melakukan jual beli atau investasi menggunakan bitcoin," tegasnya.

Daftar 57 Entitas Yang Telah Dipantau Dan Diperiksa Langsung Oleh Satgas Waspada Investasi hingga Februari 2018 Dan Harus Menghentikan Kegiatannya:

No.	Entitas
1.	Global Horizon/ http://globalhorizonmanagement.com
2.	Skyway Capital/ www.skywaytransportstring.id
3.	Financial.org
4.	14 Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri
5.	Program Senja Investasi/senja.co.id/ Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur
6.	Solusi Tunai/ Swarna / PT Rimba Hijau Investasi
7.	Program Hibah Anthoni Salim oleh Agus Santoso dan Nilia Salim
8.	Rejeki <i>Marketing</i> / PT Sumber Mulya Sentosa
9.	www.mpulsa-ind.com
10.	PT Maestro Digital Telekomunikasi/ Maestro Pulsa/ www.maestoreborn.com
11.	Coinpulsa.com
12.	www.pointpulsa.com
13.	PT Eljhon Digital Finance (Zimple Pay)
14.	Black Tuma
15.	PT Arbiel Sinar Berkah Sejahtera
16.	clicknshare/clickandshare
17.	Markas Mavrodian Manado (MMM)
18.	Aladin Capital/ Aladin Coin/ www.aladincoins.com
19.	BTC Panda/ btcpanda.com
20.	Hero Token/ https://herotoken.io
21.	Hextra Coin/ https://hextracoin.com
22.	Matadors Coin/ https://www.matadorscoin.io
23.	<i>Near Plus Coin</i> (NPC)
24.	Zapphire Coin (www.zapphirecoin.com / www.Zapphirecoin.net / www.Zapphirecoin.org)
25.	PT Djohan/ www.djohancapital.co.id
26.	PT Best Profit/ www.profitbpf.com
27.	PT Royal Trust/ www.pt-royaltrust.com
28.	PT Pacific Futures/ www.pasificfutures.com

No.	Entitas
29.	PT Trading Solid Gold Futures/ www.trading-sg.com
30.	www.investasimaxcofutures.com
31.	www.monexinvestindofutures.cf
32.	www.profitbpf.net
33.	https://www.instagram.com/bestprofit/?hl=en
34.	https://www.facebook.com/pg/bpfforex/posts/?ref=page_internal
35.	www.investasisg.com
36.	http://www.esuninternasionalutama.id
37.	https://olymptrade.id
38.	https://olymptrade.com
39.	https://fbs.forex/
40.	http://www.gainscopefx.com
41.	http://www.ecnpro.com
42.	http://fxmax.id/
43.	http://www.interbankpro.com/
44.	http://ww.euromaxfx.com
45.	Insta Forex / https://www.ifxid.com
46.	IB Insta Forex/ https://www.ifxid.co.id/
47.	Proinsta – IB InstaForex Indonesia (IB Terbaik InstaForex)/ https://www.proinsta.com/
48.	Insta Forex/ https://www.ifx.web.id/
49.	IB Insta Forex/ https://www.jayafx.com/
50.	http://octaidn.id/
51.	https://octaidn.com
52.	http://beritaforex.com/
53.	PT Traders Family International/ https://tradersfamily.co.id/
54.	http://fxchartists.com
55.	https://gkinvest.co.id/
56.	https://fxpro-indonesia.com
57.	https://gainmax.id

Mata uang virtual rawan digunakan untuk transaksi ilegal, pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Dengan demikian, ada potensi terjadinya tindak penipuan dan kejahatan lainnya.

Menyusul langkah pelarangan oleh BI, Kementerian Keuangan juga menegaskan pelarangan penggunaan mata uang virtual sebagai alat pembayaran. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menjelaskan, maraknya perkembangan *cryptocurrency* berbasis *distributed ledger technology* seperti Bitcoin, menjadi perhatian otoritas keuangan dunia mengingat potensi risiko yang besar. Tidak hanya bagi pengguna, tetapi juga bisa berdampak pada stabilitas sistem keuangan.

Oleh karena itu, Kemenkeu menegaskan bahwa sejumlah hal mengenai uang virtual yakni pertama, penggunaan uang virtual sebagai alat transaksi tidak memiliki landasan formal dan bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. “Kemenkeu mendukung kebijakan BI selaku otoritas moneter dan sistem pembayaran untuk tidak mengakui mata uang virtual sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah,” tegasnya melalui siaran pers yang dirilis, Selasa (23/1).

Kedua, mengingat belum adanya otoritas yang mengatur dan mengawasinya, penggunaan mata uang virtual rawan digunakan untuk transaksi ilegal, pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Dengan demikian, ada potensi terjadinya

tindak penipuan dan kejahatan lainnya.

Ketiga, transaksi mata uang virtual yang spekulatif dapat menimbulkan risiko penggelembungan nilai (*bubble*) yang tidak hanya merugikan masyarakat tapi juga berpotensi menggantu stabilitas sistem keuangan. Apalagi, ada risiko yang diperoleh dari memiliki atau memperjualbelikan *cryptocurrency* yang *underlying asset*-nya tidak jelas.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun secara tegas melarang Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk terlibat dalam memasarkan *cryptocurrency*. Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso menegaskan agar LJK tidak memasarkan mata uang virtual. “Kami melarang Lembaga

Jasa Keuangan untuk menggunakan dan memasarkan produk yang tidak memiliki legalitas izin,” tegasnya, Kamis (18/1).

Sebagai upaya preventif, OJK akan terus meningkatkan literasi masyarakat terkait sistem pembayaran digital agar masyarakat memahami risikonya. Selain itu, OJK melalui Satgas Waspada Investasi secara berkala mengeluarkan daftar entitas yang perlu diwaspadai masyarakat. Menurut Wimboh, saat ini yang menjadi perhatian penting adalah bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan memiliki pemahaman yang cukup mengenai transaksi digital. ●

Empat Karakter Mengapa Mata Uang Virtual Berisiko Tinggi

1 Tidak ada regulator sehingga tidak ada kepastian hukum, termasuk pengaturan terhadap pengelolaan algoritma *virtual currency*, sehingga sewaktu-waktu bisa merugi.

2 *Peer to peer* atau orang ke orang. Jadi, tidak ada pihak yang menangani keluhan karena tidak ada penengah.

3 Pseudonymity atau identitas pelaku tersamarkan atau tidak dapat diidentifikasi dengan transaksinya sehingga dapat dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal.

4 *No central authority* atau tidak terdapat entitas sentral yang menjadi subyek pengaturan. Penerbitan dan harga ditentukan *supply* dan *demand* di mana dengan jumlah *supply* yang hanya 21,26 juta membuat risiko fluktuasi sangat tinggi.

Sumber: Bank Indonesia, diolah



Sepanjang 2017, kinerja bursa saham Tanah Air tercatat sangat baik yang tercermin dari pertumbuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 19,99% atau menempati urutan ke-6 di dunia, setelah Hong Kong, India, Amerika Serikat, Filipina, dan Korea Selatan.

Saat penutupan perdagangan di penghujung 2017, IHSG ditutup menguat 41,60 poin atau 0,66% ke level 6.355,65. Level tersebut merupakan rekor baru sepanjang sejarah. Pada saat bersamaan, nilai kapitalisasi pasar (*market cap*) IHSG juga mengukir rekor baru yakni menembus level Rp7.052 triliun.

Lalu bagaimana prospek investasi saham pada Tahun Anjing Tanah ini?

Capaian yang impresif pada Tahun Ayam Api kemarin tentu memberikan sentimen positif bagi prospek investasi saham pada tahun ini. Terlebih, kondisi fundamental ekonomi baik dalam dan luar negeri juga menunjukkan tanda-tanda pemulihan.

Di tambah lagi, pada tahun ini terdapat perhelatan sejumlah

agenda penting seperti Asian Games, Piala Dunia, persiapan Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang pastinya turut mewarnai pergerakan IHSG.

Semua hajatan tersebut diharapkan bisa menggerakkan sektor riil dan pada ujungnya transaksi di pasar modal turut terdongkrak.

Sejumlah analis dari berbagai perusahaan sekuritas memprediksi IHSG pada tahun ini bisa menembus level 7.000. Misalnya, PT Mandiri Manajemen Investasi memprediksi IHSG pada tahun ini akan bergerak pada kisaran 7.100-7.200 dengan tiga faktor pendorong.

Pertama, pertumbuhan ekonomi global yang semakin membaik di mana ekonomi Amerika Serikat

tumbuh 2,6%-2,7%. *Kedua*, faktor harga komoditas yang membaik di mana harga minyak dan batu bara sudah mulai merangkak naik sejak awal tahun ini. *Ketiga*, kondisi moneter yang baik di mana suku bunga rendah dan inflasi terjaga.

Avrist Asset Management memperkirakan, reli bursa saham masih akan berlanjut pada tahun ini meski tak setinggi tahun lalu. Head of Investment Avrist Asset Management Farash Farich mengatakan, pasar saham pada tahun ini akan tumbuh sekitar 10% atau berada pada level 7.000.

“Optimisme ini didasari oleh derasnya arus dana asing yang masuk ke pasar saham,” katanya dalam acara “Outlook 2018 & Potensi Index Fund 2018” di Jakarta, Rabu (17/1).

Menurutnya, pada awal tahun, arus dana asing yang masuk telah mencapai Rp4,6 triliun, sehingga mendorong kenaikan IHSG sekitar 1,2% *year to date* (15 Januari 2018).

Selain dana asing, kinerja dan laba emiten juga diyakini terus meningkat seiring perbaikan ekonomi nasional, sehingga menjadi pendorong laju IHSG.

Terkait dengan sektoral, yang prospektif pada tahun ini, Farash merekomendasikan sektor pertambangan yang didorong oleh membaiknya harga sejumlah komoditas unggulan termasuk harga minyak dunia, barang konsumsi yang tertolong oleh naiknya daya beli masyarakat, serta sektor perbankan.

PT Binaartha Parama Sekuritas juga memproyeksikan IHSG pada tahun ini bisa mencapai 7.033 yang didukung oleh pemulihan harga komoditas dunia. Adapun sektor yang direkomendasikan adalah keuangan, konstruksi, infrastruktur, barang konsumsi, dan pertambangan.

Prediksi serupa datang dari PT Bahana Sekuritas. Perusahaan

sekuritas yang merupakan anak usaha BUMN itu memprediksi pada tahun ini IHSG akan berada pada kisaran 7.000.

Sejumlah sentimen positif yang akan mempengaruhi pergerakan bursa saham sepanjang tahun ini antara lain berlanjutnya belanja infrastruktur, dana subsidi untuk sosial, serta dana kampanye yang biasanya meningkat menjelang Pilkada serta Pilpres. Belanja-belanja tersebut diharapkan dapat mendongkrak konsumsi masyarakat.

Kepala Riset dan Strategi Bahana Sekuritas Andri Ngaserin mengatakan, faktor lain yang juga berpengaruh adalah harga komoditas global yang stabil meningkat khususnya harga batu bara sehingga akan memberi *multiplier effect* terhadap perekonomian.

“Dengan melihat beberapa faktor positif dan risiko yang perlu dicermati, indeks diperkirakan tidak akan banyak bergerak pada semester pertama tahun ini, tetapi pada semester kedua baru akan terlihat pergerakan yang berarti tergantung

pada proses dan hasil Pilkada serta menanti langkah yang akan diambil pemerintah untuk menyelamatkan anggaran 2018,” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima, Minggu (14/1).

Pada awal tahun ini, jelasnya, pasar saham Indonesia akan mencari keseimbangan terlebih dahulu. “Tahun ini pasar akan mencari keseimbangan antara stabilitas makro ekonomi yang terjaga dengan beberapa faktor risiko yang membayangi yakni tren kenaikan harga minyak dunia, perhelatan Pilkada serentak di dalam negeri serta kebijakan investasi pemerintah China,” jelasnya.

Adapun beberapa faktor risiko yang harus menjadi perhatian investor pada tahun ini adalah kebijakan Pemerintah China yang ingin mengurangi investasinya di luar negeri dalam waktu dekat termasuk di ASEAN, yang bisa berakibat pada perlambatan ekonomi domestik. Pasalnya, investasi menjadi salah satu pendorong perekonomian Indonesia.

Selanjutnya, tren kenaikan harga minyak dunia yang saat ini sudah melampaui US\$50 per barel, lebih tinggi dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam APBN 2018 sebesar US\$48 per barel.

Menurutnya, melebarnya deviasi antara harga minyak dunia dan asumsi APBN itu akan berpengaruh terhadap defisit transaksi berjalan bila tidak ada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi atau bakal menimbulkan inflasi bila harga BBM subsidi naik.

Faktor lain adalah kondisi politik di dalam negeri yang akan menghadapi Pilkada serentak serta Pilpres 2019. Di pihak lain, menurut data konsensus Bloomberg per 29 September 2017, estimasi peningkatan *Earning per Share* (EPS) atau laba per saham emiten MSCI Indonesia Index tahun ini akan mencapai 13,8%, sedikit lebih tinggi dari estimasi tahun lalu 13,6%. ●

Tahun ini pasar akan mencari keseimbangan antara stabilitas makro ekonomi yang terjaga dengan beberapa faktor risiko yang membayangi yakni tren kenaikan harga minyak dunia, perhelatan Pilkada serentak di dalam negeri serta kebijakan investasi pemerintah China.



Apa Itu Komodo Bond?

Dalam industri pasar modal, inovasi produk menjadi sebuah keniscayaan. Tujuannya pun beragam. Mulai dari pendalaman pasar modal sendiri, hingga strategi penggalangan dana yang lebih efektif dan efisien.

Salah satu produk anyar hasil inovasi di pasar modal Tanah Air adalah Komodo Bond. Nama Komodo Bond sendiri dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan sebutan sebelumnya yang lebih dulu populer, yakni Nasi Goreng Bond.

Ikut andilnya Presiden Jokowi dalam penamaan Komodo Bond tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, instrumen Komodo Bond ini pada awalnya diperuntukkan untuk perusahaan milik negara yang mendapat mandat untuk mengerjakan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional.

Sebagaimana diketahui, kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional untuk periode 5 tahun mencapai sekitar Rp1.100 triliun per tahun. Dana sebesar itu tentu tak bisa sepenuhnya dibiayai oleh APBN, sehingga memerlukan partisipasi perusahaan BUMN.

Di sisi lain, ketersediaan dana domestik juga terbatas yakni hanya Rp900 triliun per tahun, sehingga penggalangan dana atau *fund raising* dari luar negeri otomatis diperlukan. Oleh karena itu, lahirlah Komodo Bond.

Pada hakikatnya, Komodo Bond adalah instrumen surat utang korporasi yang diterbitkan dan dicatatkan di bursa di luar negeri. Bedanya, meski diterbitkan di luar negeri, denominasi Komodo Bond tetap menggunakan mata uang rupiah.

Hingga saat ini, baru terdapat dua perusahaan yang menerbitkan Komodo Bond yakni PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Emiten jalan tol Jasa Marga merupakan pelopor penerbit Komodo Bond ini. Tepatnya pada 13 Desember 2017, emiten berkode saham JSMR ini menerbitkan Komodo Bond di London Stock Exchange (LSE) dengan raihan dana mencapai Rp4 triliun. Saat penawaran, total permintaan yang masuk mencapai Rp15 triliun atau mengalami kelebihan permintaan (*oversubscribed*) hingga 3,75 kali.

Selang sebulan kemudian tepatnya 29 Januari 2018, Wijaya Karya menyusul menerbitkan Komodo Bond senilai Rp5,4 triliun di bursa London. Dan saat ini, sejumlah perusahaan BUMN lainnya juga tengah mengkaji opsi penerbitan Komodo Bond antara lain PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Telekomunikasi

Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Hutama Karya (Persero).

Penerbitan Komodo Bond dinilai sebagai alternatif pendanaan yang efektif dan efisien. Kenapa demikian? *Pertama*, likuiditas di pasar global tentu lebih besar ketimbang di pasar domestik, sehingga potensi permintaan menjadi lebih besar. Ketika permintaan besar, penerbit memiliki posisi tawar yang kuat untuk menetapkan kupon yang rendah. Dua emisi Komodo Bond yang sukses dilakukan oleh Jasa Marga dan Wijaya Karya, membuktikan hal tersebut.

Kedua, tingkat kupon di pasar global lebih rendah ketimbang tingkat kupon obligasi dengan tenor serupa di pasar domestik. Artinya, *cost of fund* dari penerbitan Komodo Bond menjadi lebih murah. Sebagai contoh, tingkat kupon yang ditawarkan Jasa Marga adalah 7,5% per tahun dengan tenor 3 tahun, sedangkan Wijaya Karya sebesar 7,7% per tahun dengan tenor yang sama. Di dalam negeri, dengan tenor yang sama, tingkat kupon yang ditawarkan bisa di atas 8% bahkan mencapai di atas 10% tergantung peringkat utangnya.

Ketiga, meski menerbitkan surat utang di pasar global, perusahaan penerbit tak dibebani dengan risiko selisih kurs karena risiko tersebut dibebankan kepada investor. Artinya, dana yang diperoleh bisa langsung digunakan tanpa harus melalui proses penukaran ke dalam mata uang lokal yang mengandung risiko kurs.

Dan *keempat*, proses penerbitan Komodo Bond di bursa luar negeri lebih mudah secara administratif dan murah secara biaya emisi. Wijaya Karya misalnya, mengaku tak dikenakan biaya tahunan dalam penerbitan Komodo Bond, tetapi hanya terkena biaya masuk sebesar 4.200 poundsterling dan *application review fees* sebesar 2.000 poundsterling. Beban dua biaya tersebut setara dengan Rp117,18 juta bila menggunakan kurs Rp18.900 per poundsterling. ●



Pengembangan SDM Teknologi Finansial

Buka Peluang Investasi Industri Keuangan

Pasar industri teknologi finansial (tekfin) di dalam negeri berkembang pesat, bahkan menjadi ladang investasi yang menarik bagi para investor, tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di berbagai belahan dunia.

Peningkatan pertumbuhan nilai investasi sektor tekfin pada periode 2011-2016 meningkat delapan kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Lihat saja beberapa perusahaan tekfin yang bergerak di bidang *Peer to Peer* (P2P) *Lending* terbesar di dunia, seperti *Lending Club* dan *Lufax*.

Kedua perusahaan tersebut mengantongi nilai investasi hingga miliaran dollar Amerika Serikat (AS) pada tahun 2016, yang menunjukkan bahwa tekfin bisa berdampak signifikan dalam mengangkat peran jasa keuangan di masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh SAGE Business Researcher, perkembangan tekfin yang paling cepat terjadi di negara-negara berkembang. Hal ini berkaitan dengan masyarakat negara berkembang yang masih belum punya akses jasa keuangan tradisional seperti bank.

Namun, teknologi digital yang sudah banyak digunakan kalangan masyarakat kecil memudahkan penerapan jasa keuangan via teknologi. Para pengusaha pun dapat melakukan pembayaran hanya dengan menggunakan telepon seluler mereka, seperti untuk membayar gaji

para karyawan tanpa harus ke bank, mengajukan pinjaman bank secara *online*, dan membeli bahan baku produk.

Menurut World Bank, dari data sekitar 2 miliar orang yang belum tersentuh oleh jasa keuangan, jumlah tersebut makin menurun sejak 2011 di mana sekitar 700 juta orang sudah mulai memanfaatkan jasa lembaga keuangan baik tradisional maupun melalui tekfin.

Saat ini, dengan *platform* tekfin, masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau kantor perbankan untuk melakukan transaksi keuangan. Hal

itu dikarenakan masyarakat dapat memanfaatkan layanan tekfin dari masing-masing lembaga keuangan perbankan.

Bahkan, masyarakat saat ini pun bisa mencari keuntungan dengan berinvestasi karena sudah banyak *platform* tekfin yang menawarkan manajemen portofolio investasi, masyarakat juga bisa mengajukan pinjaman dengan bunga yang tetap dan rendah langsung kepada investor melalui *platform* tekfin *P2P Lending*.

Pertumbuhan tekfin belakangan ini semakin membuka peluang kerja sama antarberbagai negara sebagai upayaantisipasi kemajuan industri teknologi dan industri keuangan yang harus segera disikapi oleh pemerintah di semua negara. Kerja sama antarnegara itu pun menjadi salah satu upaya pemerintah negara setempat dalam mendorong pertumbuhan tekfin lebih maju lagi.

Pertukaran Sumber Daya Manusia (SDM) dari berbagai negara menjadi pilihan dalam rangka mengembangkan keahlian bidang tekfin, seperti halnya yang dilakukan Indonesia dan Australia. Kedua negara tersebut menandatangani dokumen perjanjian pada awal Desember 2017.

Keterangan tertulis Direktur Kebijakan Publik Asosiasi FinTech Indonesia Ajisatria Suleiman yang dikutip Selasa, 19 Desember 2017 menyebutkan, perjanjian kerja sama itu menjadi tahap penting bagi perkembangan dan pertumbuhan industri tekfin bagi kedua negara.

Penandatanganan dokumen kerjasama itu disaksikan oleh Direktur Inovasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fithri Hadi dan Wakil Kepala Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Internasional Australia Dan Thomas. Kerja sama ini memungkinkan tersedianya platform untuk memfasilitasi pertukaran SDM, teknologi, permodalan, dan penetrasi pasar bagi perusahaan-perusahaan tekfin dari kedua negara.

Secara khusus perjanjian ini mengikat kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam membuka jalan bagi komunitas tekfin Australia, termasuk warga Indonesia yang saat ini bekerja di Australia, untuk membangun kemitraan dan membantu memecahkan berbagai tantangan industri di Indonesia.

Kerja sama itu juga membuka kesempatan bagi para pengembang tekfin Indonesia untuk berpartisipasi dalam program magang dan bekerja di Australia, berbagi pengetahuan, data dan informasi, khususnya di bidang manajemen resiko, keamanan data (*cyber security*), infrastruktur data, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), serta seputar

kebijakan dan peraturan dalam pemanfaatan teknologi (*regulatory technology*) untuk mendukung ekosistem industri di kedua negara.

Industri tekfin kedua negara juga akan memantapkan lingkungan industri untuk mewujudkan 'pusat tekfin' yang dapat menjadi simpul penghubung antar pihak di kedua negara, khususnya untuk mempromosikan aliran modal yang lebih banyak di antara kedua negara.

Kedua belah pihak juga bersepakat untuk bertukar informasi mengenai anggota industri kedua negara guna memfasilitasi usaha-usaha tekfin dalam menemukan mitra yang sesuai satu sama lain. Pemerintah Australia juga telah membuktikan komitmen seriusnya selama dua puluh tahun terakhir ini untuk mendukung agenda Indonesia dalam mewujudkan inklusi keuangan, memantapkan stabilitas sistem keuangannya, serta sebagai bentuk pendekatan berimbang yang mendorong pertumbuhan inovasi lintas kedua yuridiksi.

OJK sebelumnya juga telah menjalin kerja sama dengan otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan di sejumlah negara dan lembaga internasional, seperti Financial Services Agency of Japan, China Banking Regulatory Commission, Bank Negara Malaysia, Dubai Financial Service Authority, dan Financial Services Commission Financial Supervisory Service of the Republic of Korea.

Selain itu, kerja sama juga dilakukan dengan Central Bank of Timor-Leste/Banco Central de Timor-Leste, Bank of Thailand, Astana International Financial Centre, International Organization of Securities Commission, The United Nations Development Programme, International Finance Corporation, The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD), Islamic Development Bank, Toronto Centre, dan Asian Development Bank. ●



Valuasi IHSG Tinggi

Di Indonesia, sejak krisis 2008 hingga saat ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sudah tumbuh sangat tinggi sekitar 513% ketika menyentuh level tertingginya pada level 6.686 pada akhir Januari 2018.

Konsensus analis memberikan proyeksi pertumbuhan IHSG rata-rata mencapai 6.800 hingga akhir tahun ini. Dengan posisi IHSG terkini, hanya tinggal kurang dari 10%

untuk mencapai target harga yang seharusnya baru akan dicapai pada akhir tahun nanti. *Level* 7.000 pun diperkirakan bisa disentuh sepanjang tahun ini.

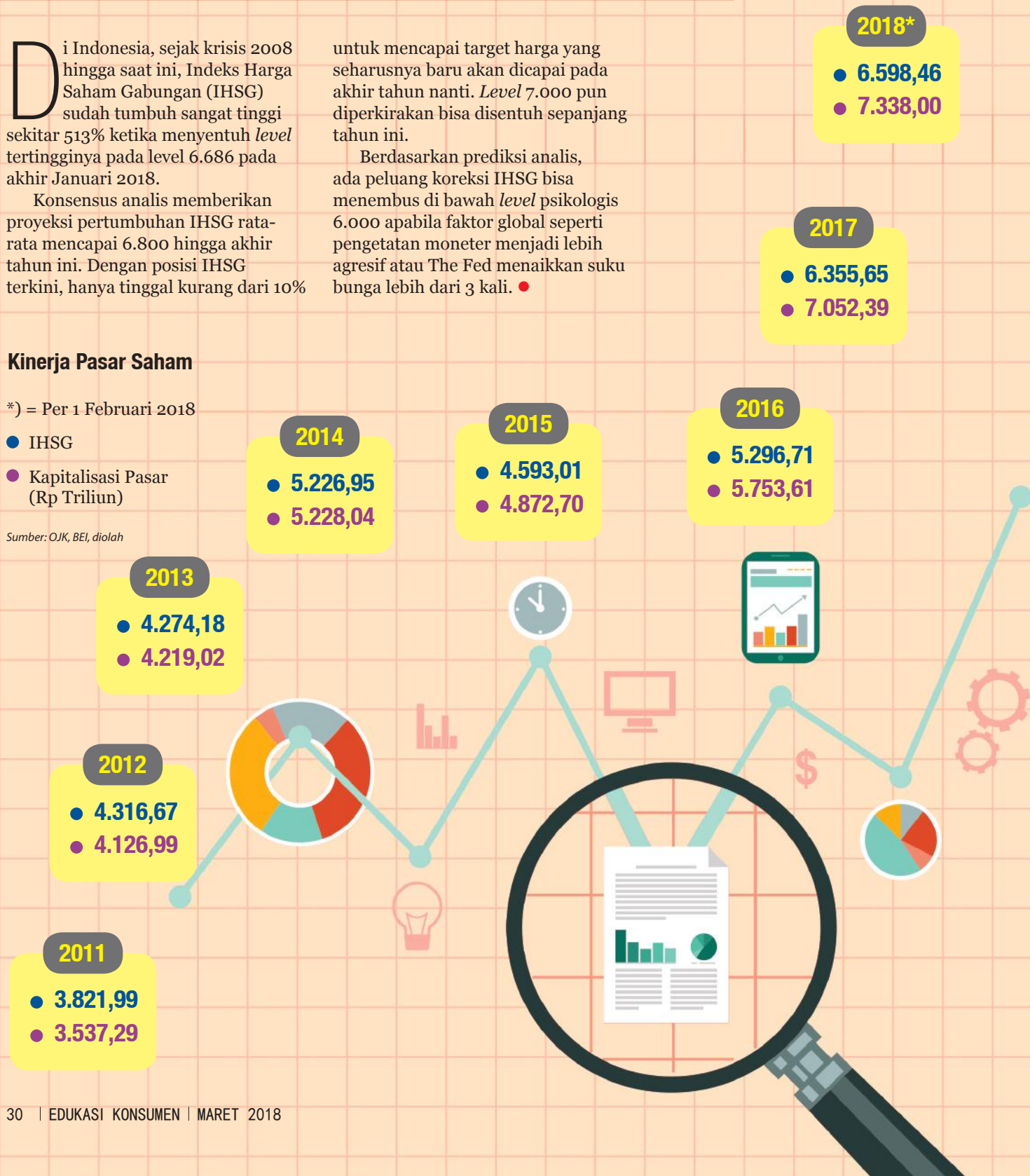
Berdasarkan prediksi analis, ada peluang koreksi IHSG bisa menembus di bawah *level* psikologis 6.000 apabila faktor global seperti pengetatan moneter menjadi lebih agresif atau The Fed menaikkan suku bunga lebih dari 3 kali. ●

Kinerja Pasar Saham

*) = Per 1 Februari 2018

- IHSG
- Kapitalisasi Pasar (Rp Triliun)

Sumber: OJK, BEI, diolah



NPF Industri *Multifinance* Diyakini Terus Membaik

Tahun lalu menjadi musim yang cerah bagi industri *multifinance*. Meskipun kinerja penyaluran pembiayaan hanya tumbuh satu digit, industri dapat menjaga kualitas pembiayaan dan mencatatkan perbaikan secara bertahap hingga penutup tahun.

Mengacu data yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) sektor *multifinance* yang tercatat 3,26% pada penutup 2016 mampu ditekan ke level 2,96% pada akhir 2017.

Sejumlah faktor, termasuk faktor selektivitas dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah dinilai menjadi penyebab terjaganya kualitas pembiayaan sepanjang 2017. Kualitas pembiayaan yang membaik sepanjang tahun lalu juga diharapkan akan berlanjut pada tahun ini.

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno pun mendorong agar perusahaan pembiayaan

dapat tetap menjaga kualitas pembiayaan pada tahun ini. Dengan demikian, tren perbaikan rasio NPF dapat tetap dipertahankan.

Setelah mencapai level 2,96% per akhir 2017, asosiasi yang menaungi pelaku industri *multifinance* ini berharap rasio NPF pada akhir 2018 bisa berada pada kisaran 2,7%. Pada 2017, lanjut Suwandi, pertumbuhan pembiayaan *multifinance* hanya 7,05%.

Angka ini lebih rendah dari target awal yang ditetapkan asosiasi yaitu 8%-9%. Penjualan otomotif yang cenderung stagnan turut berpengaruh terhadap rendahnya pertumbuhan pembiayaan pada tahun lalu.

Data yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan, penjualan mobil pada 2017 hanya tumbuh 1,6%. Berdasarkan catatan Gaikindo, penjualan mobil sepanjang 2017 mencapai 1,07 juta unit. Hanya ada sedikit kenaikan dibandingkan dengan penjualan pada 2016 yang mencapai 1,06 juta unit.

Sementara itu, data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menunjukkan, penjualan sepeda motor ke diler atau *wholesales* justru menyusut 0,76%, dari 5,93 juta unit pada 2016 menjadi 5,88 juta unit pada 2017. Seperti dikatakan Suwandi, segmen otomotif masih berkontribusi besar terhadap total pembiayaan yang disalurkan *multifinance*. “Jadi, lesunya penjualan otomotif sangat

mempengaruhi pertumbuhan pembiayaan,” kata Suwandi, Selasa (23/1).

Di sisi lain, masa kerja pada akhir 2017 juga relatif lebih singkat, yang membuat proses pemasaran menjadi tidak optimal. Suwandi menyebutkan, meskipun pembiayaan sektor kendaraan bermotor pada tahun lalu sulit tumbuh tinggi, perusahaan *multifinance* tetap selektif. Menurutnya, sebagian besar perusahaan pembiayaan tidak berupaya untuk melonggarkan kebijakan dalam penyaluran pembiayaan.

Dengan demikian, kualitas pembiayaan menjadi terjaga, dan kenaikan rasio NPF dapat dicegah. “Untuk rasio NPF [pada 2017] masih sesuai dengan target kami, bahkan lebih baik, karena sebelumnya diperkirakan rasio NPF hingga akhir 2017 akan berada pada kisaran 3%,” ujarnya.

Perbaikan kualitas pembiayaan pada tahun lalu juga mendorong optimisme sejumlah pelaku usaha *multifinance* untuk terus menjaga rasio NPF pada tahun ini.

PT MNC Sewa Guna Usaha Indonesia (MNC Leasing) termasuk yang optimistis mampu menjaga rasio NPF di bawah level 1% sepanjang 2018. Pada akhir 2017, MNC Leasing mampu merealisasikan NPF senilai 0,66%, lebih baik dibandingkan 0,99% pada akhir 2016.

Sementara itu, pada paparan mengenai perkembangan sektor jasa keuangan yang disampaikan OJK, November 2017, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Riswinandi Idris menyebutkan bahwa perbaikan rasio kredit bermasalah perusahaan pembiayaan dapat dicapai, karena pelaku industri terus berupaya untuk menjaga kualitas pembiayaan. “Kami terus mengingatkan perusahaan pembiayaan untuk tetap menjaga kualitas pembiayaan dan aset, sehingga rasio NPF bisa terus membaik,” kata Riswinandi. ●



Februari 2017

- OJK Mendukung Program Penyaluran bantuan Sosial (Bansos) Non Tunai yang dilaksanakan pada Program Bantuan pangan, program Keluarga harapan (PKH), dan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diresmikan Presiden joko Widodo pada akhir Februari 2017.
- OJK menyelenggarakan kegiatan Training of trainers (ToT) di Makassar pada 21–22 Februari 2017.

April 2017

- Seminar internasional Dana Pensiun “25 Years Of Pension Savings–Way Forward For Next Quarter Century” di Jakarta, Selasa (25/4/2017).
- Kerjasama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Australian Securities and Investments Commision (ASIC) mengenai pertukaran informasi di bidang inovasi layanan sektor jasa keuangan termasuk perkembangan *financial technology* (fintech) pada 21 April 2017.

Juni 2017

Penghargaan Global Inclusion Award 2017 untuk Indonesia



Januari 2017

Aplikasi Ponsel Sikapi Uangmu



Maret 2017

OJK & Kemendikbud Bersinergi



Mei 2017

- Seminar internasional “Changing Consumer Behaviour Throug Financial Literacy, Financial Inclusion, and Consumer Protection” pada 4–5 Mei di Nusa, Bali. Dalam seminar itu dibahas berbagai hal terkait dengan strategi menghadapi perubahan perilaku konsumen yang sangat cepat.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merealisasikan Galeri Investasi *Mobile* (GIM) ketujuh di Universitas Cendrawasih (Uncen) Jayapura pada Senin, 29 Mei 2017.

Agustus 2017

OJK Raih Gold Kategori The Best Technology Innovation bagi Corporate



Juli 2017

OJK Luncurkan E-Book untuk SMA, Profesional & Pensiunan



Oktober 2017

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan industri keuangan syariah menggelar “Keuangan Syariah Fair (KSF)” dalam rangka mengkampanyekan Aku Cinta Keuangan Syariah (ACKS) di Cibinong City Mall, Bogor pada 27–29 Oktober 2017.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bekerja sama dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik Lampung menggelar kegiatan sosialisasi “Hari Menabung Nasional 2017” pada 31 Oktober hingga 1 November 2017 di Hotel Horison Lampung.

September 2017

Kompetisi Inklusi Keuangan KOINKU 2017



Desember 2017

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengundang 27 Perguruan Tinggi yang ada di Jakarta untuk melakukan kegiatan Sinergi Edukasi sebagai tindak lanjut peluncuran Buku Seri Literasi Keuangan Tingkat Perguruan Tinggi pada 6 dan 7 Desember 2017.

November 2017

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Kota Palu menggelar kegiatan Edukasi Keuangan Syariah kepada para pelaku UMKM pada Selasa 14 November 2017.

OJK dari Masa ke Masa (EPK OJK Sepanjang 2017)



Wimboh Santoso
Ketua Dewan Komisiner OJK

Perbankan Siap Berlari Kencang

Setelah sibuk melakukan konsolidasi pada tahun lalu dan membuat fungsi intermediasi berjalan lambat, pada tahun ini perbankan diyakini siap berlari kencang. Namun, itu semua tergantung dengan permintaan pada sektor riil.

Berikut ini wawancara dengan Ketua Dewan Komisiner OJK **Wimboh Santoso** yang dilakukan dalam beberapa kesempatan, mengenai prospek bisnis perbankan pada 2018:

Bagaimana prospek ekonomi Indonesia pada 2018?

Sudah sering dibicarakan, sekarang *lah* waktunya, bahwa kesempatan untuk lebih baik itu di mulai pada tahun ini. Seharusnya mungkin tahun lalu, tapi untuk Indonesia tahun ini. Karena ekonomi dunia itu sudah mulai jalan cepat, bukan hanya menggeliat.

Jika prediksi-prediksi yang dikeluarkan sangat moderat, kesempatan ini tidak boleh kita lewatkan, bagaimana kita memanfaatkannya. Dengan basis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun lalu 5,07%. Inflasi indeks harga konsumen 3,18%, itu modal yang bagus untuk kita bisa bergerak cepat.

Karena inflasi tentunya tidak memberikan kendala untuk kejar pertumbuhan ekonomi pada tahun ini yang diproyeksi 5,4%. Angka inflasi itu yang paling rendah dalam sejarah Indonesia.

Setelah tahun lalu kredit hanya tumbuh satu digit, bagaimana dengan kondisi perbankan?

Kredit perbankan tahun lalu tercatat tumbuh sekitar 8,35%. Itu bukan karena bank malas memberikan kredit, tapi karena ada beberapa nasabah yang terpaksa harus di *write off* untuk menyesuaikan rasio NPL [*Non Performing Loan*] di bawah 3%.

Jumlah kredit yang di-*write off* dalam segmen tertentu itu tidak bisa menutup jumlah kredit yang sudah disalurkan, sehingga *in total* rasio pertumbuhan 8,35%.

NPL dulu bisa meningkat bukan karena faktor domestik, tetapi karena faktor harga komoditi yang *drop drastic*, sehingga eksportir kita, meskipun jumlahnya yang dieskpor sama, itu harganya turun lebih dari 20%. Namun pada 2018, ini mustinya sudah mulai lebih bagus.

Artinya, apakah pada tahun ini bisnis bank akan lebih baik?

Di sektor perbankan, ini kita punya modal yang cukup baik rasio CAR [*Capital Adequacy Ratio*] 23,6%. Kuatnya permodalan perbankan ini juga diikuti dengan

likuiditas yang memadai. Pada Desember 2017, rasio Alat Likuid per *Non Core Deposit* (AL/NCD) perbankan tercatat sebesar 90,48%, di atas *threshold* sebesar 50%. Sementara *excess reserve* perbankan tercatat di kisaran Rp626 triliun.

Uang perbankan cukup besar, ekseknya, di simpan di BI [Bank Indonesia], cukup besar. Pernah kami hitung, kredit perbankan Indonesia ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi hingga sebesar 7%. Karena modalnya kuat dan likuiditasnya cukup. Tinggal bagaimana pelakunya [sektor riil] bisa lari kencang tidak.

Satu sisi NPL kita juga semakin rendah di bawah 3%. Konsolidasi akan terus dilakukan meskipun nilainya lebih kecil daripada tahun lalu.

Optimisme untuk memacu pertumbuhan bisa dilihat dari dalam Rencana Bisnis Bank pada tahun ini, yang menargetkan ekspansi kredit dan dana pihak ketiga masing-masing sebesar 12,23% dan 11,16%.

Tahun ini pemerintah masih fokus ke infrastruktur, bagaimana tantangan pembiayaan perbankan di sektor itu?

Kalau kita [hanya] lihat uang yang ada di Indonesia memang *enggak* cukup, perbankan juga *enggak* cukup, dana BUMN lainnya juga *enggak* cukup, apalagi APBN.

Tapi, dengan keyakinan dan potensi besar, kita bisa menarik dana luar negeri yang begitu besar. Utang luar negeri Indonesia





Optimisme untuk memacu pertumbuhan bisa dilihat dari dalam Rencana Bisnis Bank pada tahun ini, yang menargetkan ekspansi kredit dan dana pihak ketiga masing-masing sebesar 12,23% dan 11,16%.

sekarang ini 34%-35%. Ini masih jauh dari GDP negara-negara G20. *Benchmark*-nya Turki, [utang] Turki itu tinggi sekali, tapi mereka aman-aman saja sudah bertahun-tahun. Sehingga dana luar negeri yang masuk tidak perlu di takutkan.

Kita punya US\$130 miliar di cadangan devisa kita, bisa untuk membiayai impor selama 8 bulan. Ini sangat luar biasa. Itu juga cukup untuk pembiayaan bunga kalau ada utang luar negeri.

Utang luar negeri itu tentu jangka panjang sehingga dalam waktu 10 tahun semoga kita sudah bisa menggerak aktivitas ekonomi

dengan pembangunan infrastruktur sehingga kita tidak perlu khawatir. Ini adalah sekaligus kesempatan, karena semua masih terukur angka-angkanya.

Namun, pembangunan infrastruktur harus memberikan efek berganda.

Maksudnya bagaimana?

Ya, misalnya, kalau kita hanya membangun fasilitas jalan tol, MRT atau LRT, tetapi tidak disertai pengembangan kawasan tidak akan memberikan *multiplier* efek. Misalnya, harus dibangun pemukiman di kawasan pemberhentian atau stasiun LRT

atau yang disebut konsep TOD [*Transit Oriented Development*].

Itu pun pemukiman harus bisa menyerap banyak permintaan. Jadi kalau *landed house* saja kan sedikit. Musti pengembangan secara vertikal.

Siapakah yang harus melakukan ini?

Ya semua pihak. Bank pun harus meng-*create* kredit baru di sini. Tidak bisa bank hanya mengandalkan kredit datang sendiri, tetapi harus dijemput, dengan meng-*create* bisnis-bisnis baru. Agar ekonomi juga berkembang. ●

M. Nadjikh
 Presiden Direktur KML Group

Membuka Akses Keuangan kepada Nelayan Kecil



Sektor perikanan masih menjadi salah satu sektor yang belum banyak disentuh oleh perbankan. Nelayan sulit mendapatkan pinjaman perbankan karena model bisnis mereka dinilai terlalu berisiko. Di tengah kondisi itu, Mohammad Nadjikh, Presiden Direktur PT Kelola Mina Laut (KML) Group yang berbasis di Jawa Timur, mencoba membuat model bisnis yang cocok bagi perbankan dan nelayan agar dapat saling terhubung.

Bagaimana model bisnis yang cocok dikembangkan nelayan kecil pemasok bahan baku untuk KML?

Kami menyebutnya kemitraan. Model bisnis ini sudah kami mulai sejak 1994 lalu ketika kami baru memulai bisnis. Saya meminta nelayan menangkap teri nasi atau teri medan dengan jaminan seluruh hasil tangkapan mereka akan kami beli. Syaratnya, kualitas harus bagus.

Agar hasil tangkapan nelayan sesuai standar, kami memberikan modal berupa *cool box* dan es batu secara gratis. Setelah dua tahun menggunakan perlengkapan itu, biasanya mereka akan mampu membeli sendiri untuk kebutuhan

ekspansi, karena memang sangat membantu mempertahankan kualitas hasil tangkapan.

Kemitraan ini membutuhkan dukungan dari perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya.

Bagaimana kerja sama yang dilakukan antara KML dengan perbankan?

Dimulai dengan kerja sama antara KML dengan perbankan. Bank mendukung kami dalam hal pembiayaan, utamanya untuk kebutuhan modal kerja.

Nelayan selalu meminta bayaran dalam bentuk tunai setiap kali berangkat melaut dan menjual hasil tangkapan. Padahal kami butuh waktu

untuk mengumpulkan bahan baku, mengolah hasil laut, dan kemudian mengekspornya.

Ekspor biasanya dibayar 2-3 bulan setelah dikirim. Dalam jangka waktu tersebut, kami membutuhkan pinjaman dari perbankan, untuk kemudian dibayar ketika kami sudah menerima pembayaran dari hasil ekspor.

Di masa mendatang, kami ingin memperluas kerja sama dengan bank dalam kapasitas sebagai pemberi rekomendasi. Jadi bank bisa langsung menyalurkan pinjaman kepada nelayan atau kepada juragan kapal, atas rekomendasi dari kami.

Kami juga bisa membantu untuk memastikan cicilan ke bank bisa lancar karena langsung dipotong dari hasil penjualan ikan dari para nelayan itu, yang dipasok ke kami.

Pinjaman langsung ke nelayan atau juragan ikan itu bisa untuk membeli mesin, atau membeli kapal baru, alat tangkap, dan kebutuhan lainnya terkait dengan bisnis.

Sebenarnya apa masalah utama yang dihadapi oleh nelayan untuk mendapatkan pembiayaan?

Sekarang ada Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang khusus untuk sektor perikanan. Ada alokasi khusus untuk perikanan. Itu sudah cukup bagus. Akan tetapi, mekanisme penyalurannya harus dievaluasi.

Sejak dulu, kredit perbankan termasuk KUR ini selalu mengalir secara langsung kepada nelayan ataupun juragannya. Tapi pengawasannya kurang.

Penggunaan uang pinjaman itu untuk apa, kita tidak pernah tahu. Padahal *kan* yang penting tujuannya untuk apa, apakah benar untuk beli kapal atau alat tangkap? Atau justru digunakan untuk kebutuhan lain yang tidak berhubungan dengan usaha perikanan.

Menurut saya, penyaluran kredit kepada nelayan harus dikoneksikan dengan perusahaan yang akan menampung hasil tangkapan mereka.

Harus ada komunikasi antara bank, nelayan, dan perusahaan yang menyerap hasil tangkapan nelayan. Ada komunikasi mengenai kebutuhan apa yang harus dipenuhi agar hasil tangkapan benar-benar bisa diserap oleh pasar.

Seperti apa model komunikasi dengan perusahaan penampung hasil tangkapan ikan dari nelayan?

KUR kalau jumlahnya banyak kan kadang-kadang perusahaan yang membina para nelayan itu diminta menjamin. Padahal, uangnya kan disalurkan secara langsung ke nelayan.

Itu merupakan kondisi yang sulit bagi perusahaan seperti kami yang diminta menjamin, karena risiko keberhasilannya kecil.

Bagaimana agar terkoneksi? Ya kami harus dilibatkan dalam proses bisnis sejak awal. Misalnya, jika nelayan membutuhkan pinjaman bank untuk pengadaan kapal, maka harus dikomunikasikan kapal jenis apa untuk menangkap ikan apa.

Ini harus melibatkan kami sebagai penyerap ikan hasil tangkapan, agar tidak salah beli.

Apa rekomendasi Bapak terkait penyaluran kredit ke sektor perikanan?

Sebaiknya dibuat model bisnis kredit yang spesifik untuk perikanan. Jangan terlalu umum.

Harus dijelaskan betul penyaluran kredit perikanan itu untuk debitur di bidang apa, komoditinya apa, disesuaikan dengan karakteristik daerah juga.

Pembiayaannya juga bermacam-macam, bisa untuk pengadaan alat tangkap, pembelian mesin, peremajaan kapal, atau peningkatan usaha baru seperti pengolahan ikan dan lainnya.

Harus dibuat model bisnis yang pas di suatu daerah, untuk memformulasikan skema kredit yang cocok seperti apa. Sebab kebutuhan nelayan di setiap

daerah berbeda, sehingga perlu ada modifikasi.

Pengawasan dan pembinaan bisa dilakukan oleh bank melalui kerja sama dengan perusahaan penampung hasil tangkapan ataupun para juragan kapal.

Bagaimana strategi meningkatkan inklusi keuangan pada nelayan kecil?

Inklusi keuangan akan tercipta apabila rantai bisnis tidak terputus dan saling menguntungkan.

Dimulai dari nelayan, juragan, pemilik kapal, hingga perusahaan yang mau beli hasil tangkapannya.

Bagaimana caranya agar mereka bisa bekerja sama untuk memajukan bisnis masing-masing. Misal, saya sebagai perusahaan eksportir ikan dan olahan ikan butuh komoditas ikan jenis A.

Saya berharap nelayan menangkap itu. Saya harus komunikasikan itu kepada juragan pemilik kapal yang akan meneruskannya kepada nelayan. Sebagai pembeli, saya menjanjikan kompensasi berupa harga yang layak.

Komunikasi itu penting agar nelayan tidak asal tangkap lalu setelah itu tidak tahu mau dijual ke mana.

Ketika komunikasi terjaga, hasil tangkapan mereka akan bisa diserap oleh pasar, sehingga mereka bisa mencicil pinjamannya ke perbankan. Pada gilirannya, bank tidak akan ragu menyalurkan pinjaman kepada nelayan.

Bisnis model harus saling percaya. Ikan hasil tangkapan pasti dibeli, dengan demikian kebutuhan bahan baku juga terpenuhi. Ada kepastian untuk bisa ekspor juga. Jadi *win-win solution*. ●



Aturan Detil tentang Asuransi Barang Milik Negara Disiapkan

Dalam waktu dekat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengeluarkan aturan detil mengenai program Asuransi Barang Milik Negara (ABMN). Di saat yang sama, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, memastikan hanya akan melibatkan perusahaan asuransi berkualitas untuk menggarap pasar pertanggung jawaban barang milik negara.

Plt. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Asep Iskandar mengatakan, saat ini otoritas sedang melakukan kajian untuk merevisi aturan mengenai penetapan tarif premi pada lini usaha asuransi harta benda dan asuransi kendaraan bermotor yang tertuang dalam Surat Edaran OJK atau SEOJK No.6/2017. Dia menuturkan,

detil aturan mengenai penetapan tarif terhadap ABMN juga akan dimuat dalam rancangan surat edaran.

Jika tidak ada hambatan, pihaknya menargetkan aturan tersebut dapat rampung pada tahun ini. “Memang sedang dilakukan *review* soal penyesuaian tarif, supaya lebih fleksibel dan sesuai dengan perkembangan saat ini,” jelasnya, Kamis (1/2).

Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Encep Sudarwan menjelaskan, tujuan pemerintah mengadakan program ABMN adalah untuk mengamankan Barang Milik Negara (BMN). Pengamanan itu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, dan mengacu pada prinsip selektif, efisiensi, efektivitas, dan prioritas.

Total nilai aset BMN sampai dengan semester I/2017, menurut Encep, mencapai Rp2,183 triliun. Dari jumlah tersebut, aset terbesar dalam bentuk tanah dengan nilai mencapai

Program ABMN pada awalnya ditargetkan dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2018. Akan tetapi, prosesnya belum dapat berjalan, karena masih menunggu terbitnya pedoman pelaksana dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan (KMK). KMK tersebut akan mengatur lebih detil mengenai objek BMN yang dapat diasuransikan.

Rp1,01 triliun. Pelaksanaan asuransi barang milik negara ini mengacu pada Pasal 45 Peraturan Pemerintah atau PP No.27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Selain itu, program ABMN juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK247/PMK.06/2016 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

Asep menyebutkan, program ABMN pada awalnya ditargetkan dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2018. Akan tetapi, prosesnya belum

dapat berjalan, karena masih menunggu terbitnya pedoman pelaksana dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan (KMK). KMK tersebut akan mengatur lebih detil mengenai objek BMN yang dapat diasuransikan.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatawarta memastikan, pemerintah hanya akan melibatkan perusahaan asuransi berkualitas dalam pelaksanaan ABMN. Oleh karena itu, tidak semua perusahaan asuransi akan dapat bekerjasama dalam pengasuransian barang milik negara. “Tidak ada pemerataan ke semua perusahaan asuransi. Yang mau bekerjasama dengan pemerintah, sehatkan dulu perusahaannya. Lakukan segala sesuatu lebih dari apa yang diatur dalam regulasi,” katanya.

Dia menyampaikan, pemerintah akan meminta bantuan kepada OJK untuk melakukan penilaian terhadap perusahaan asuransi umum yang memenuhi kualifikasi untuk menjamin BMN. Menurut Isa, ada hal yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan ABMN yakni membangun kompetensi sumber daya manusia di lingkungan kementerian dan





“Ini adalah kebijakan yang besar dan bermanfaat. Tetapi juga perlu kerja keras untuk menyiapkannya. Pemerintah tidak akan melakukan secara buru-buru dan gegabah.”

lembaga. Sebab, sebagaimana diatur dalam PMK No. 247/2016, penyusunan rencana pengasuransian BMN dilakukan oleh pengguna barang di kementerian maupun lembaga pengguna barang.

Dengan demikian, kata dia, akan ada 87 kementerian maupun lembaga negara yang akan menjadi mitra dalam pengasuransian barang milik negara.

“Ini adalah kebijakan yang besar dan bermanfaat. Tetapi juga perlu kerja keras untuk menyiapkannya. Pemerintah tidak akan melakukan secara buru-buru dan gegabah,” katanya.

Terobosan Industri

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe mengatakan, ABMN merupakan terobosan bagus terhadap industri asuransi. Lebih lanjut, AAUI menilai diperlukan kapasitas bersama melalui koasuransi maupun konsorsium dalam pelaksanaan ABMN, karena nilai eksposur yang besar.

Oleh karena itu, dia menilai perlunya produk asuransi standar AAUI atau produk bersama, dalam kapasitas bersama. Dody mengatakan, pihaknya akan mengajukan produk standar ABMN dengan mencantumkan

risiko sesuai dengan yang diinginkan tertanggung kepada OJK. “Selanjutnya, untuk disetujui dan diserahkan ke DJKN untuk di-cover baik melalui konsorsium maupun koasuransi,” tambahnya.

Dengan dijadikannya ABMN sebagai produk asuransi standar, lanjutnya, anggota AAUI dapat memasarkan produk tanpa harus mengurus perizinan terlebih dahulu. Jika ingin memasarkan produk tersebut, pelaku industri asuransi umum hanya perlu mendaftarkan atau melaporkan saja ke OJK. Adapun, dengan adanya konsorsium, kapasitas asuradur dalam pertanggungansian risiko itu bakal meningkat. ●

Pengelolaan Dana Jaminan Sosial Atasi Defisit, Bauran Strategi Disiapkan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau dikenal dengan sebutan BPJS Kesehatan tengah menanti beleid baru yang diharapkan dapat menjawab problematika defisit menahun.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan sudah menyiapkan sejumlah langkah startegis untuk mengatasi soal defisit yang telah berlangsung sejak badan tersebut berdiri pada awal 2014 silam.

Strategi yang disiapkan itu nantinya akan dirumuskan ke dalam revisi Perpres No. 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan. Saat ini, revisi

perpres tersebut sudah mencapai tahap akhir.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, strategi tersebut merupakan bauran kebijakan yang dirumuskan secara bersama-sama sejumlah lembaga lain dan antar lintas kementerian.

Beberapa kementerian yang terlibat dalam perumusan tersebut yakni Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan,

akibat biaya pelayanan peserta setiap bulannya tidak sesuai atau *mismatch* dengan pendapatan BPJS Kesehatan.

Sesaat setelah penelahaan, Presiden Jokowi mengadakan rapat kabinet guna mengatasi *mismatch* tersebut.

Penanganan defisit BPJS Kesehatan dirunut ke dalam tujuh langkah strategi. Langkah *Pertama* yakni optimalisasi manajemen klaim dan mitigasi fraud.

Kedua, memperkuat peran badan pengelola dalam *strategic purchasing*, sehingga menjaga posisinya sebagai *purchaser*. *Ketiga*, mengoptimalkan peran FKTP sebagai *gatekeeper* yang akan mengendalikan rujukan.

Menurut Fahmi, sistem rujukan dapat dilaksanakan secara efektif pada era jaminan kesehatan nasional (JKN). Di sisi lain, lanjutnya, sistem rujukan juga dapat mengefisienkan biaya pelayanan kesehatan.

Keempat, menerapkan *cost sharing* atau iur biaya untuk beberapa pelayanan kesehatan. Hal itu akan dilakukan oleh BPJS Kesehatan guna menanggulangi potensi *moral hazard* yang dilakukan pasien.

Kelima, efisiensi dana operasional. *Keenam*, penyesuaian batas atas upah untuk kategori peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang saat ini nilainya masih di bawah angka keekonomian.

Terakhir, mendorong peran pemerintah daerah untuk mengalokasikan 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dana kesehatan, serta 75% dari 50% alokasi pajak rokok dan bagi hasil cukai sebesar 50% dari pemerintah daerah untuk pembiayaan pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, terdapat peran krusial dari Kementerian Keuangan. ●



Gagasan untuk langkah revisi kali ini bermula dari defisit yang melanda BPJS Kesehatan pada 2016 akibat biaya pelayanan peserta setiap bulannya tidak sesuai atau *mismatch* dengan pendapatan BPJS Kesehatan.

Dewan Jaminan Sosial Nasional, Kementerian Keuangan dan lainnya. “Tunggu Perpres-nya keluar, nanti itu jawabannya,” kata Fahmi saat menjawab tentang langkah mengatasi defisit, Rabu (31/1).

Hingga saat ini, Perpres tentang Jaminan Kesehatan sudah mengalami revisi sebanyak dua kali. Revisi pertama kali terjadi pada 2014 dan yang kedua kali pada 2016.

Adapun, gagasan untuk langkah revisi kali ini bermula dari defisit yang melanda BPJS Kesehatan pada 2016



Utak Atik Investasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Bagi pengelola dana pensiun, awal tahun merupakan saat yang tepat untuk mengevaluasi kelolaan dana sepanjang tahun sebelumnya dan menyiapkan kembali rancangan kelolaan dana untuk setahun ke depan.

Sebagai gambaran, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Statistik Dana Pensiun per Desember 2017 menunjukkan *Return On Investment* (ROI) sektor dana pensiun mencapai 7,2%. Realisasi itu lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada 2016, yaitu sebesar 8,3%.

Bila dirincikan, ROI Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang menjalankan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) menurun dari 8,5% pada Desember 2016 menjadi 7,7%. ROI DPPK yang menjalankan Program Pensiun Iuran Pasti (PIPP) pun menyusut dari 7,2% menjadi 6,9%.

Di antara pelaksana dana pensiun, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) mengalami penurunan ROI paling drastis. Per Desember 2017, ROI DPLK tercatat 'hanya' 6,2%, turun dari 8,2% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Wakil Ketua Perkumpulan-DPLK Nur Hasan Kurniawan mengakui, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi penurunan ROI DPLK secara umum pada tahun lalu. Salah satunya, jelasnya, masih dominannya alokasi penempatan dana investasi pada instrumen deposito.

Menurut dia, hampir 70% aset DPLK ditempatkan pada deposito. Padahal pada tahun lalu masih terjadi tren penurunan suku bunga perbankan pada tahun lalu masih berlanjut. "Kami sampaikan kepada anggota bahwa penurunan itu relevan, sebab hampir 70% aset DPLK di deposito," ungkapnya, Selasa (30/1).

Jika melihat komposisi penempatan dana yang dilakukan oleh DPLK sampai dengan akhir 2017, deposito memang mendominasi.

Berdasarkan data statistik dana pensiun yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebanyak Rp43,20 triliun atau 57,98% dari total investasi DPLK ditempatkan pada instrumen deposito berjangka. Sebagai catatan, jumlah dana yang diinvestasikan oleh DPLK per Desember 2017 mencapai Rp74,51 triliun, tumbuh 18,06% dari Rp63,11 triliun.

Kemudian, Rp1,51 triliun atau 2,04% pada sertifikat deposito dan Rp330 miliar atau 0,44% pada deposito *on call*. Adapun, selebihnya pada surat berharga pemerintah, saham, obligasi, sukuk, unit penyertaan reksa dana, medium term notes, dan efek beragun aset dari KIK EBA.

Nur Hasan memperkirakan, kondisi serupa masih akan berlanjut hingga akhir tahun ini. Dia meyakini sepanjang tahun ini perubahan komposisi investasi DPLK secara umum tidak akan banyak berubah.

Menurutnya, kebanyakan perusahaan menempatkan dananya di DPLK dalam wujud program pensiun untuk kompensasi pesangon atau PPUKP. Mengacu kondisi tersebut, penempatan investasi di instrumen pasar uang diyakini lebih aman.

Dengan begitu, dana tersebut dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu untuk memberikan pesangon. "Menurut saya ROI tidak akan berubah ketimbang 2017, bahkan bisa turun. Kalaupun ada perubahan komposisi, tidak akan lebih dari 5%," ungkapnya.

Oleh karena itu, perhimpunan yang menaungi para pelaku DPLK ini memberikan masukan kepada anggotanya untuk memberikan edukasi kepada nasabah, khususnya yang terkait dengan opsi diversifikasi penempatan dana.

Dengan kondisi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, lanjutnya, DPLK harus pandai-pandai memberikan penjelasan kepada nasabah untuk melakukan diversifikasi, agar tidak hanya investasi di pasar uang.

Di samping memberikan penjelasan kepada nasabah, Nur Hasan mengatakan P-DPLK juga telah mulai melakukan ujian sertifikasi kepada tenaga pemasar dan karyawan DPLK. Menurutnya, melalui sertifikasi tersebut pihaknya bisa meningkatkan pemahaman kepada tenaga pemasar terkait pengaturan investasi. ●

Asa Berkembang di Industri Pergadaian

Setelah sekian lama bisnis pergadaian hadir di Tanah Air, akhirnya cabang bisnis di sektor industri keuangan non bank itu menunjukkan sinyal untuk berlari kencang.

Pada awal tahun ini, tepatnya pada 24 Januari 2018, para pelaku usaha di segemen bisnis tersebut resmi memiliki wadah untuk bernaung yang diberi nama Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia. Pembentukan asosiasi itu terbentuk setelah Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riswinandi memberikan persetujuan kepada PPGI sebagai asosiasi melalui surat No.S-5/D.05/2018 pada 15 Januari 2018.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/2016 tentang Usaha Pergadaian mewajibkan setiap perusahaan pergadaian untuk mengantongi izin dan menjadi anggota asosiasi. Menurut Ketua Umum Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI) Harianto Widodo, selain tertuang dalam regulasi, pembentukan asosiasi bertujuan untuk membesarkan industri pergadaian. “Kami ingin membesarkan industri ini bersama-sama dengan pemain yang ada, sehingga *market size*-nya, karena banyak yang membesarkan, juga akan menjadi semakin besar,” kata Harianto, Jumat (23/2).

Pasal 40, dalam beleid itu menyebutkan bahwa perusahaan pergadaian wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi. Bagi perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha sebelum terbentuknya asosiasi, wajib bergabung dalam keanggotaan paling lama 3 bulan sejak asosiasi terbentuk. Aturan itu juga menyebutkan

bahwa asosiasi memiliki tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan standar praktik dan kode etik perusahaan pergadaian, dan mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.

Kini, seperti diakui oleh Harianto, pekerjaan rumah pertama bagi asosiasi yang baru berusia 2 bulan itu yakni menjaring anggota. PPGI ini pun aktif melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada pelaku-pelaku usaha gadai lainnya, khususnya yang telah terdaftar di regulator dan telah mendapatkan izin usaha.

Sebagai prioritas tahap awal, asosiasi terutama gencar bersosialisasi untuk menjaring anggota yang berada di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Pihaknya mengaku sudah mengirimkan undangan untuk bertemu dan melakukan audiensi kepada delapan hingga sembilan perusahaan gadai di kawasan. “Karena ini asosiasi baru, kemampuan untuk *roadshow* ke seluruh Indonesia terbatas,” katanya.

Adapun sampai dengan saat ini, asosiasi baru beranggotakan tiga perusahaan pergadaian. Tiga perusahaan tersebut yakni PT Pegadaian, PT Gadai Pinjam Indonesia, dan PT HBD Gadai Nusantara.

Mengacu data OJK, sampai dengan Januari 2018 tercatat sebanyak tujuh belas perusahaan gadai yang terdaftar dan berizin OJK. Tujuh belas perusahaan tersebut yakni PT Pegadaian (Persero), Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Sejahtera Abadi, Koperasi Serba Usaha Dana Usaha, PT HBD Gadai Nusantara, PT Mitra Kita, PT Gadai



Pinjam Indonesia, PT Sarana Gadai Prioritas, PT Mas Agung Sejahtera, PT Surya Pilar Kencana, PT Mitra Gadai Sejahtera Kepri d/h PT Pegadaian Mitra Kepri, PT Svaraputra Penjuru Vijaya, PT Pusat Gadai Indonesia, PT Persada Aritha Mandiri, Solusi Gadai, PT Jasa Gadai Syariah, CV Souverino Ekasakti, dan PT Sili Gadai Nusantara.

Harianto mengakui, asosiasi belum memiliki alamat seluruh perusahaan gadai yang telah berizin dan terdaftar tersebut. Oleh karena itu, pihaknya berkoordinasi dengan otoritas untuk menjaring ke-17 perusahaan. “Kami akan berkoordinasi dengan OJK supaya kami bisa mengundang. “Tim di asosiasi tengah mempersiapkan program kerja, dan akan segera berkomunikasi dengan OJK,” kata Direktur PT Pegadaian itu.

Jika mengacu POJK No. 31/2016, masa transisi sebelum peraturan ini resmi berlaku akan berakhir 29 Juli 2018. Setelah itu, perusahaan gadai yang belum mendapatkan izin dan terdaftar sebagai anggota asosiasi, bisa ditindak secara hukum. ●

Pentingnya Menjaga Riwayat Kredit

Pernahkah kalian mendengar bahwa pengajuan kredit bisa ditolak? Atau mungkin ada dari antara Anda yang pernah mengajukan kredit lalu ditolak?

Hal itu bisa saja terjadi karena riwayat kredit yang Anda miliki tidak sehat. Setiap kredit yang Anda ajukan, baik itu Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Usaha Rakyat (KUR), maupun pinjaman uang tanpa jaminan atau Kredit Tanpa Agunan (KTA), riwayat pembayarannya tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dulu lebih dikenal dengan nama BI *Checking*, dimana sejak 1 Januari 2018 pengelolaan riwayat kredit debitur yang semula dilakukan oleh Bank Indonesia, saat ini dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Riwayat kredit Anda akan diukur berdasarkan histori aktivitas kredit yang dinilai dari skala 1-5 atau yang biasa disebut dengan Kolektibilitas (Kol) seperti yang dijelaskan dibawah ini:

1. Kredit Lancar atau Kol 1: Kredit yang memuaskan dimana Anda mampu menyelesaikan segala kewajiban seperti angsuran, pokok utang, dan bunga tanpa ada cela.

2. Kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) atau Kol 2: Terdapat tunggakan selama 1-2 bulan yang biasanya disebabkan karena keterlambatan pembayaran.
3. Kredit Tidak Lancar atau Kol 3: Terdapat tunggakan selama kurun 3-4 bulan. Pendekatan yang dilakukan kepada nasabah pun tidak membuahkan hasil.
4. Kredit Diragukan atau Kol 4: Kredit tidak lancar yang telah jatuh tempo tapi belum juga diselesaikan oleh debitur lebih dari 5-6 bulan.
5. Kredit Macet atau Kol 5: Kredit tidak lancar yang tertunggak lebih dari 6 bulan dan telah diusahakan untuk diaktifkan kembali tapi tetap tidak membuahkan hasil.

Salah satu penentu lolos tidaknya pinjaman tunai yang Anda ajukan adalah dari kelima skala diatas. Jika riwayat kredit Anda berada di Kol 1, maka kemungkinan besar pengajuannya akan disetujui.

Sementara jika pada Kol 2, pengajuan Anda bisa disetujui ataupun ditolak, sedangkan untuk Kol 3 ke atas, pengajuan biasanya akan langsung ditolak.

Untuk itu, penting untuk ketahui bahwa riwayat kredit yang Anda miliki, bisa dan akan berpengaruh pada pengajuan kredit kedepannya, ditambah lagi dengan mudahnya pengajuan Kredit Tanpa Agunan (KTA) saat ini, membuat Anda tergoda meminjam kredit tanpa perhitungan yang menyebabkan riwayat kredit Anda menjadi buruk.

Kondisi finansial yang baik ditentukan oleh Anda sendiri sebagai pengatur keuangan. Hal-hal yang perlu Anda perhatikan di antaranya lakukan perencanaan pembayaran dengan melakukan *posting* diawal untuk membayar semua utang atau kredit di tiap bulannya dan disiplin dalam mengatur keuangan yaitu membayar tagihan tepat waktu.

Selain itu, pastikan juga saat memasukkan data atau informasi Anda sebagai calon debitur, Anda sudah memasukkan semua data atau informasi dengan benar dan jelas tentunya.

Informasi mengenai debitur atau pihak yang menerima kredit atau pinjaman dari Lembaga Jasa Keuangan atau LJK bisa diakses lebih lengkap melalui SLIK.

Sistem ini bertujuan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan informasi keuangan, yang salah satunya berupa penyediaan Informasi Debitur (iDeb). SLIK memperluas cakupan iDeb, yaitu melingkupi lembaga keuangan bank dan lembaga pembiayaan (*finance*) dan juga ke lembaga keuangan non bank yang mempunyai akses data debitur dan kewajiban melaporkan data debitur ke Sistem Informasi Debitur (SID). ●





Edukasi Keuangan dari OJK untuk Masyarakat Perbatasan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan edukasi keuangan bagi masyarakat di wilayah perbatasan pada 1 Februari 2018 di Aula Hotel Matahari, Atambua, Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan itu diawali dengan sambutan I Wayan Sadnyana mewakili Kepala Kantor OJK NTT dan Willybrodus Lay, Bupati Kabupaten Belu sekaligus membuka acara tersebut.



Edukasi keuangan yang dihadiri oleh 287 peserta itu ternyata melebihi target peserta yang semula diperkirakan hanya dihadiri oleh sekitar 150 orang. Berdasarkan pengamatan di lapangan, hal tersebut karena peserta yang hadir menginfokan kepada rekannya agar turut menghadiri kegiatan edukasi.

Tercatat ada sejumlah materi edukasi disampaikan kepada peserta, di antaranya adalah mengenai pengenalan OJK dan Waspada Investasi oleh Sondang Martha Samosir, Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK, serta paparan mengenai Perencanaan Keuangan oleh Yang Sultan Bestari, staf Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan OJK.

Selain itu, pembicara lainnya adalah M. Idar Ariesmunandar, Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Atambua dan paparan tentang Pengenalan Produk Perbankan oleh Louis Katarino Gonsalves Atie, Kepala Cabang Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT Atambua. ●



OJK Gandeng Ikadin Sosialisasi Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan & Fidusia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember, Jawa Timur menggandeng Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) se-5 Kabupaten yang berada di wilayah kerja OJK Jember dalam mengadakan sosialisasi perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan jaminan fidusia pada 9 Februari 2018.

Acara Sosialisasi yang dilaksanakan di Ballroom Dafam Hotel itu dihadiri sekitar 100 anggota beserta pengurus Ikadin.

Pada kesempatan tersebut, Mulyadi, Kepala OJK Jember menjelaskan tentang pentingnya sinergitas antara advokat dengan OJK terutama dalam menangani penyelesaian kasus

perlindungan konsumen dan perikatan jaminan melalui fidusia. Harapannya agar dapat satu pemahaman dalam menyelesaikan kasus yang dimaksud.

Turut hadir Kepala Bagian Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Kantor Regional 4 Jawa Timur untuk memberikan penjelasan terkait perikatan jaminan melalui fidusia serta staf Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) OJK Jember memberikan penjelasan mengenai perlindungan konsumen pada Sektor Jasa Keuangan. ●



Polres Situbondo & OJK Jember gelar Sosialisasi Waspada Investasi & Perjanjian Fidusia

Merespon maraknya investasi masyarakat di wilayah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Kepolisian Resort (Polres) Situbondo mengundang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember untuk memberikan pemahaman kepada jajaran anggota Polres dalam sosialisasi Waspada Investasi Bodong dan Perjanjian Fidusia.

Kegiatan yang diikuti oleh sebanyak 150 anggota polisi di lingkungan Polres Situbondo itu

diselenggarakan pada 1 Februari 2018. Sosialisasi ini dilaksanakan untuk meningkatkan sinergi antara OJK Jember dengan Polres Situbondo.

Kepala OJK Jember, Mulyadi dalam sambutannya mengajak masyarakat harus lebih pintar dalam memilih investasi, karena terdapat banyak masyarakat yang telah menjadi korban investasi ilegal dengan nilai kerugian material yang tidak sedikit.

Dalam beberapa kasus, tawaran investasi ilegal tersebut juga memanfaatkan figur-figur yang cukup dikenal oleh masyarakat. Melalui Satuan Babinkamtibmas di setiap polsek sewilayah Situbondo, masyarakat diharapkan dapat melaporkan setiap investasi yang mencurigakan kepada Satgas Waspada Investasi.

Dalam kesempatan tersebut, juga dijelaskan tentang waspada berinvestasi serta perjanjian fidusia. ●



OJK NTB Edukasi Siswa Difabel Tunanetra

Para penyandang disabilitas atau difabel menjadi salah satu kelompok yang menjadi sasaran prioritas edukasi dan literasi keuangan. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan kegiatan edukasi produk dan layanan industri jasa keuangan kepada siswa penyandang difabel tunanetra dengan kondisi *totally blind* dan *low vision* di wilayah Kota Mataram.

Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (24/1) ini diikuti oleh para siswa difabel dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah di aula Sekolah Luar Biasa Tipe A milik Yayasan Pendidikan Tuna Netra Mataram (SLB-A YPTN Mataram). Mereka hadir dengan didampingi oleh tenaga pengajar dan tenaga administrasi sekolah yang juga menyandang tunanetra.

Pada kesempatan tersebut, Kepala OJK Provinsi NTB Farid Faletehan menyampaikan visi mulia yang diemban OJK, salah satunya

yakni melindungi kepentingan konsumen industri jasa keuangan dan masyarakat melalui peningkatan literasi keuangan. Masyarakat akan mampu menentukan layanan keuangan yang dibutuhkan secara tepat, jika mereka memahami secara baik manfaat dan risiko produk, serta hak dan kewajiban yang muncul jika menjadi konsumen.

Industri jasa keuangan juga telah menyediakan ragam produk yang dapat memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat. Untuk itu, para peserta dari kelompok penyandang disabilitas didorong untuk memanfaatkan layanan untuk berinvestasi bagi masa depan yang lebih baik.

Di sisi lain, hampir semua lulusan siswa SLB juga telah bekerja di berbagai bidang sesuai keahlian mereka, diantaranya dengan menjadi guru SLB, penyanyi, pemusik maupun pemijat tradisional. Oleh karena itu, diperlukan bekal ilmu perencanaan keuangan dan pemahaman terhadap

produk lembaga keuangan untuk dapat mengelola pendapatan mereka di kemudian hari.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Sekolah SLB-A YPTN Mataram Sumiati menyampaikan apresiasi atas inisiatif OJK mengedukasi para peserta didik dalam hal keuangan. Dia mengakui kurangnya perhatian pemerintah dan diskriminasi oleh masyarakat umum membuat para siswa difabel cenderung minder dan tidak mampu mengekspresikan keinginannya, padahal dibalik kekurangan fisik yang ada, mereka juga dianugerahi berbagai kelebihan.

OJK NTB juga menghadirkan pemateri dari Kepala Bursa Efek Indonesia (BEI) perwakilan Mataram, Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) NTB dan Kepala PT Pegadaian Cabang Mataram. Jadi, banyak peserta yang menanyakan secara tenteng produk keuangan seperti reksadana, investasi emas, asuransi unit *link*, dan lain-lain. ●

Edukasi Keuangan bagi Komunitas Nelayan



Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Pemerintah Negeri Tial menyelenggarakan Edukasi Keuangan kepada nelayan dan istri nelayan di Baileo, Desa Tial, Kabupaten Maluku Tengah pada 1 Februari 2018.

Kegiatan tersebut diikuti oleh sebanyak 102 orang nelayan dan istri nelayan. Acara tersebut dihadiri dan dibuka oleh Jamal Tuarita, Kepala Negeri Tial, Kabupaten Maluku Tengah. Peserta kegiatan menerima sesi pengenalan OJK dan Waspada Investasi yang disampaikan oleh Horas V.M Tarihoran, Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK.

Selanjutnya, ada beberapa narasumber menyampaikan

berbagai materi edukasi keuangan, seperti Agus Slamet Wijaya selaku General Manager PT Kelola Mina Laut memberikan materi tentang kewirausahaan dan Tri Budi, Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) Kota Ambon menyampaikan materi mengenai pengenalan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sementara itu, Johana Unepetty selaku Konsultan Keuangan Mitra Bank Kota Ambon menyampaikan materi tentang Teknik Pembukuan Sederhana. Dari paparan narasumber tersebut, peserta terlihat sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan, mengingat yang disampaikan adalah tambahan pengetahuan bagi masyarakat

nelayan mengenai edukasi keuangan.

Pada pelaksanaan kegiatan edukasi tersebut juga dilakukan *pre-test* dan *post-test* untuk mengetahui peningkatan indeks literasi para peserta. Didapatkan hasil peningkatan pemahaman peserta mengenai materi yang disampaikan dengan peningkatan sebesar 15.25%.

Dengan potensi kelautan yang sangat bagus khususnya di Negeri Tial, nelayan masih belum hidup dengan layak dan sejahtera. Diharapkan dari edukasi keuangan yang telah diselenggarakan oleh OJK, para nelayan dapat melakukan pengelolaan keuangan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. ●



OJK Beri Edukasi Waspada Investasi untuk Tim Penggerak PKK & UMKM Jambi

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ditengah krisis ekonomi dan dukungan dari Komunitas Pemberdayaan Kesejahteraan

Keluarga (PKK) dalam memperbaiki ekonomi keluarga mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan edukasi Waspada Investasi di Kota Jambi pada 24-25 Januari 2018.



Kerja sama dengan Komunitas PKK di Kota Jambi ini dilakukan pada 24 Januari 2018 di Aula Rumah Dinas Gubernur Provinsi Jambi. Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK, Sondang Martha Samosir dan Sherrin Tharia Zola selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi membuka kegiatan edukasi tersebut.

Sedikitnya 123 orang peserta yang terdiri dari pengurus dan anggota PKK dan Bhayangkari Provinsi Jambi mengikuti edukasi Waspada Investasi tersebut.

Peningkatan pemahaman peserta mengenai materi yang disampaikan berdasarkan peningkatan nilai *pre-test* dan *post-test* sebesar 10,25% dengan nilai rata-rata *pre-test* 58,89% dan *post-test* yaitu 69,14%.

Sementara itu, edukasi keuangan bagi pelaku UMKM di Kota Jambi adalah hasil kerja sama OJK dengan Dinas Koperasi dan UKM, serta PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi. Penjelasan tentang Waspada Investasi itu diselenggarakan pada 25 Januari 2018 di Kota Jambi.

Acara pembukaan diawali dengan sambutan dari Rozi Roziani, Direktur Kepatuhan PT BPD Jambi dan Sondang Martha Samosir selaku Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK sekaligus membuka kegiatan edukasi tersebut.

Kegiatan itu diikuti oleh sebanyak 150 peserta yang terdiri dari pelaku UMKM di Provinsi Jambi.

Berdasarkan data, peningkatan pemahaman peserta mengenai materi yang disampaikan berdasarkan peningkatan nilai *pre-test* dan *post-test* sebesar 11,44% dengan nilai rata-rata *pre-test* 57,58% dan *post-test* yaitu 69,02%.

Diharapkan dengan adanya edukasi yang dilakukan OJK ini, UMKM di kota Jambi dapat berkembang dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. ●

Membangun Kesadaran Berinvestasi

Investasi bagi sebagian masyarakat, khususnya di kota-kota besar sudah menjadi pilihan tersendiri.

Setidaknya, itu terlihat dari sejumlah kegiatan seperti seminar atau diskusi yang digelar oleh pelaku industri jasa keuangan. Tak sedikit masyarakat yang menaruh antusiasme dengan seminar yang bertemakan investasi dan pengenalan produk keuangan.

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan tingkat pengetahuan masyarakat, pilihan investasi semakin beragam. Masyarakat mulai berani menjajal investasi di produk pasar modal seperti misalnya, membeli obligasi ritel maupun reksa dana.

Pemahaman masyarakat yang terus meningkat terhadap produk keuangan setidaknya tercermin dari indeks literasi dan indeks inklusi yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebagai perbandingan, pada 2013 indeks literasi keuangan tercatat 21,84%, lalu meningkat pada survei 2016 menjadi 29,66%.

Ada enam provinsi setidaknya yang indeks literasi keuangannya di atas 35% yakni DKI Jakarta (40%), Jawa Barat (38,70%), Yogyakarta (38,55%), Banten (38,17), Bali (37,45%), dan Kepulauan Riau (37,09%).

Adapun untuk indeks inklusi keuangan pada 2016 tercatat 67,82% dibandingkan dengan 2013 sebesar 59,74%.

Data yang tersaji itu menunjukkan bahwa tingkat

pengetahuan masyarakat dan tingkat pendalaman pasar keuangan terus membaik.

Akan tetapi, itu bukan pencapaian akhir. Tantangan untuk meningkatkan penetrasi pasar keuangan masih terbuka.

Berkembangnya layanan keuangan berbasis teknologi menjadi harapan baru. Namun, tetap harus dijalankan sesuai dengan kaidah dasar industri keuangan yang aman bagi masyarakat.

Acapkali, masyarakat mudah tergiur dengan kemudahan teknologi yang ditawarkan lalu mengabaikan faktor keamanan dan kenyamanan dalam berinteraksi dengan penyedia jasa keuangan.

OJK tentu mengharapkan kesadaran publik terhadap layanan keuangan berbasis teknologi ini meningkat. Bagaimanapun, setiap kegiatan di industri jasa keuangan harus memperoleh izin dari OJK sebagai bentuk jaminan keamanan bagi publik sebagai pengguna.

Pelaku industri jasa keuangan di satu sisi juga harus terus berbenah menyesuaikan tren teknologi dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam mengakses layanan investasi.

Dengan teknologi yang terus membaik, peran masyarakat diharapkan juga akan meningkat. Muaranya adalah lahirnya masyarakat yang melek investasi sehingga mampu memberi kontribusi terhadap perekonomian nasional. ●





INKLUSI KEUANGAN

u n t u k s e m u a

